

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PADA
BIRO BINA PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT PROPINSI
SULAWESI SELATAN**

**THE EFFECTIVENESS OF DATA AND INFORMATION
MANAGEMENT AT THE ECONOMICS AND DEVELOPMENT
BUREAU SECRETARIAT OF SOUTH SULAWESI PROVINCE**

ENNYWATI

P.080 120 1508



PERPUSTAKAAN PISAT LINGG	
Tgl. Terima	16 - 6 - 03
Asal Dari	Pps
Banyaknya	2 ekz.
Harga	Hadiah
No. Inventaris	030616.511
No. Klas	

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2003

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PADA
BIRO BINA PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT PROPINSI
SULAWESI SELATAN**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program studi

Administrasi Pembangunan

Disusun dan diajukan oleh

E N N Y W A T I

P.080 120 1508

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2003**

TESIS

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PADA
BIRO BINA PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT PROPINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

ENNYWATI
Nomor Pokok P0801201508

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 6 Juni 2003
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Dr. M.M. Papayungan, MA.
Ketua

Drs. Andi Yakub, M.Si.
Anggota

Ketua Program Studi
Administrasi Pembangunan

Prof. Dr. A.R. Paembonan, MS.

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. M. Natsir Nessa, MS.

PRAKATA

Segala puji dipanjatkan kehadirat Allah, SWT yang sudah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat diselesaikan penyusunan tesis ini tepat pada waktunya.

Dalam penyusunannya, telah diterima bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Natsir Nessa, M.S, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. DR. A.R. Paembonan, MS, selaku Ketua Program Studi Administras Pembangunan Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak Dr. M.M. Papayungan, MA. Dan Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si selaku Pembimbing pertama dan kedua, yang dengan sungguh-sungguh telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan isi tesis ini.
4. Bapak Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan yang telah memberi ijin pada penulis mengikuti tugas belajar pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, sehingga penulis dapat mengikuti semua aktivitas perkuliahan hingga selesainya penulisan tesis ini.



5. Kepada Suami dan Anak-anak tercinta yang senantiasa memberikan petunjuk, semangat dan doa sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak dan Ibu Dosen, dalam lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, khususnya Program Administrasi Pembangunan atas segala keihlasan dan kesungguhannya dalam memberikan motivasi dan spirit dalam penyelesaian tesis ini.

Disadari bahwa meskipun telah diupayakan penyempurnaannya, pembahasan tesis ini masih dijumpai kekurangan-kekurangan yang terlepas dari pengamatan dan analisis yang digunakan. Untuk itu, saran, masukan dan kritik yang obyektif dan bertujuan menyempurnakan isi dan pembahasannya, diharapkan dari semua pihak.

Semoga semua bantuan dan jerih payah yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dan setimpal hanya dari Allah Swt.

Makassar, 2003

Penulis

ABSTRAK

Ennywati. Efektivitas Pengelolaan Data dan Informasi Pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan. (Dibimbing Oleh : **M.M. Papayungan dan Andi Yakub**)

Studi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei sampel dengan wawancara dan kuesioner serta dilengkapi observasi sebagai teknik pengumpulan data.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses pengumpulan data, kegiatan analisis dan penilaian, pelaksanaan pelaporan serta publikasi data belum dapat berlangsung secara efektif. Faktor-faktor penyebab dari kekurangan ini adalah masih kurangnya sarana perkantoran seperti faksimile, computer, dan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia/personalia.

ABSTRACT

Ennywati, THE EFFECTIVENESS OF DATA AND INFORMATION MANAGEMEN AT THE ECONOMICS AND DEVELOPMENT BUREAU SECRETARIAT OF SOUTH SULAWESI PROVINCE (supervised by M.M. Papayungan and Andi Yakub)

The objective of this study is to know effectiveness of data and information management at the economic and development bureau, the Secretariat of South Sulawesi province.

The research method used is survey sample utilising interview and questionnaire matched by observation as technique of data collection.

The results of this study indicate that data analysis, evaluation and reporting are ineffectively managed. Factors responsible for this short coming are a lack of office equipments like faximilie and computer, and low quality of human resource/personnel.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II. KERANGKA TEORITIK DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Efektivitas	6
B. Konsep Pengelolaan	9
C. Informasi	11
D. Konsep Pembangunan	13
D. Kerangka Pemikiran	31

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	32
B. Unit Analisis	32
C. Metode Pengumpulan data	33
D. Analisis Data	35
E. Definisi Operasional Variabel	36

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	39
1. Tugas dan Fungsi	39
2. Visi dan Misi	40
3. Sasaran Organisasi	41
B. Pengelolaan Data Dan Informasi	43
1. Pengumpulan data	43
2. Analisa dan Penilaian	63
3. Pelaporan	74
4. Publikasi Data	88
C. Efektivitas Pengelolaan Data Dan Informasi	96
1. Pengumpulan data	97
2. Analisa dan Penilaian	98
3. Pelaporan	100
4. Publikasi Data	101

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	32
B. Unit Analisis	32
C. Metode Pengumpulan data	33
D. Analisis Data	35
E. Definisi Operasional Variabel	36

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	39
1. Tugas dan Fungsi	39
2. Visi dan Misi	40
3. Sasaran Organisasi	41
B. Pengelolaan Data Dan Informasi	43
1. Pengumpulan data	43
2. Analisa dan Penilaian	63
3. Pelaporan	74
4. Publikasi Data	88
C. Efektivitas Pengelolaan Data Dan Informasi	96
1. Pengumpulan data	97
2. Analisa dan Penilaian	98
3. Pelaporan	100
4. Publikasi Data	101



BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

103

B. Saran

104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No		Halaman
1.	Distribusi jawaban responden terhadap data dan informasi	44
2.	Distribusi jawaban responden terhadap persiapan pelaksanaan pengumpulan data	47
3.	Distribusi jawaban responden terhadap waktu pelaksanaan pengumpulan data	50
4.	Distribusi jawaban responden terhadap sarana dan prasana pengumpulan data	53
5.	Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan data dan informasi pada Biro Perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	54
6.	Pendidikan Formal Aparat Biro Bina Perekonomian dan pembangunan	56
7.	Distribusi jawaban responden terhadap penempatan SDM aparat berdasarkan pendidikan formal	59
8.	Distribusi jawaban responden terhadap keterampilan SDM aparat	61
9.	Distribusi jawaban responden terhadap analisa dan penilaian data dan informasi	63
10.	Distribusi jawaban responden terhadap pencatatan data dan informasi	66
11.	Distribusi jawaban responden terhadap kekeliruan pencatatan data dan informasi penggunaan dana APBD	68
12.	Distribusi jawaban responden terhadap keterlambatan pencatatan data dan informasi	70
13.	Distribusi jawaban responden terhadap penilaian data dan informasi	

masi	73
14. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan menurut Sektor tahun 2000 sampai 2002	75
15. Distribusi jawaban responden terhadap meringkas data dan informasi	76
16. Distribusi jawaban responden terhadap keterlibatan lembaga/instansi terkait dalam penyusunan data dan informasi	80
17. Distribusi jawaban responden terhadap penyusunan laporan	83
18. Distribusi jawaban responden terhadap waktu penyampaian informasi laporan	86
19. Distribusi jawaban responden terhadap keterlibatan lembaga/instansi terkait dalam penyusunan laporan	87
20. Distribusi jawaban responden terhadap publikasi data dan informasi perkembangan pembangunan dan perekonomian	90
21. Distribusi jawaban responden terhadap efektivitas pengelolaan data dan informasi	97
22. Distribusi jawaban responden terhadap efektivitas analisa dan penilaian data dan informasi	99
23. Distribusi jawaban responden terhadap efektivitas pelaksanaan pelaporan data dan informasi	100
24. Distribusi jawaban responden terhadap publikasi data dan informasi	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar:	Halaman
1. Kerangka Pemikiran	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor : 22/1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan daerah (Kabupaten) bersangkutan, namun beberapa faktor turut menentukan keberhasilannya. Untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab sehingga mampu memberi kontribusi atas kemajuan daerah dan kemajuan masyarakatnya, tidak semata-mata ditentukan oleh potensi daerah, seperti sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam, juga ditentukan oleh koordinasi pelaksanaannya, khususnya koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan, salah satu tugas pokoknya adalah pengelolaan data dan informasi pembangunan, berperan besar terhadap keberhasilan pemantapan program pembangunan ekonomi daerah, karena hanya dengan pengelolaan data dan informasi yang mantap dan terarah penyusunan program ekonomi dapat diwujudkan secara nyata, efektif dan efisien.

Pengelolaan data dan informasi yang efektif pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat diwujudkan agar dapat menjadi masukan pada semua unit kerja/instansi maupun lembaga di lingkungan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyusun program kegiatannya dengan baik sehingga rencana program pembangunan sektor ekonomi akan dapat disusun dengan baik sesuai potensi pembangunan ekonomi di daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Dalam rangka pemantapan otonomi daerah, terlihat pengelolaan data dan informasi untuk mendukung program pembangunan sektor ekonomi belum menjamin pemantapan otonomi daerah yang hendak diwujudkan. Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa pengelolaan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan masih mengalami hambatan karena belum dilaksanakan pengumpulan data secara obyektif dari instansi dan lembaga terkait sehingga data yang diolah belum akurat, seperti data dan informasi keadaan ekonomi dan kondisi keuangan serta program pembangunan daerah tidak sesuai keadaan sebenarnya. Hal ini mengakibatkan analisis dan penilaian data yang dilakukan kurang akurat karena tidak didasari data dan informasi obyektif sesuai keadaan sebenarnya.

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan

adalah pelaporan hasil pengelolaan data dan informasi kurang tepat waktu, sehingga penyusunan program pembangunan maupun rencana kerja di unit kerja/instansi/lembaga terkait yang membutuhkan data dan informasi yang akurat dan valid, tidak dapat dilaksanakan dengan tepat waktu. Kondisi tersebut mempengaruhi pelaksanaan analisis dan publikasi yang dilaksanakan, dan berpengaruh pada kelancaran penyusunan program pembangunan bidang ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan.

Jika dikaitkan dengan tujuan pengelolaan data dan informasi untuk mendukung program pembangunan bidang ekonomi yang seharusnya dapat diolah dengan cepat dan tepat agar dapat menjadi dasar penyusunan program pembangunan ekonomi, belum dapat diwujudkan dengan efektif pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut disebabkan karena efektivitas terhadap pengumpulan data, analisa dan penilaian, pelaporan dan publikasi data masih kurang dilaksanakan. Kenyataan ini merupakan kendala yang dijumpai dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan sehubungan dengan penyusunan program pembangunan bidang ekonomi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Bagaimanakah pengelolaan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tingkat efektivitas pengelolaan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memberi kontribusi terhadap pengelolaan data dan informasi berupa pengumpulan data, analisa dan penilaian, pelaporan dan publikasi terhadap kelancaran program pembangunan bidang ekonomi.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini ialah:

1. Diharapkan memberi sumbangan pengembangan ilmu- khususnya di bidang administrasi pembangunan.

2. Pembahasan yang dilakukan diharapkan akan dapat memberi masukan kepada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan. agar dalam mengelola data dan informasi dapat mengupayakan percepatan pelaksanaan sekaligus mampu mewujudkan suatu informasi yang akurat bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Agar mendukung pembahasan, akan dikemukakan teori-teori yang dianggap relevan dan dapat dijadikan acuan bagi penentuan kerangka pikir tesis ini.

A. Teori Efektifitas

Pengertian efektifitas memiliki arti berbeda-beda yang dikemukakan oleh oleh para ahli, namun hakikatnya perbedaan tersebut tidak mengakibatkan kerancuan terhadap pengertiannya, namun saling melengkapi sehingga menggambarkan pengertian mendekati sempurna terhadap makna dari efektifitas.

The Liang Gie (1989 : 37) mengemukakan bahwa efektifitas merupakan "Perbandingan terbaik antara input dan output, antara keuntungan dengan biaya (antara hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil maksimum yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas, dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan".

Konsep efektifitas dari *The Liang Gie* tersebut mengisyaratkan bahwa jika efektifitas akan diwujudkan dalam organisasi, seluruh input atau semua sumber (*resources*) yang digunakan untuk mencapai tujuan hendaknya digunakan secara berdayaguna dan berhasilguna. Kamus Istilah

Manajemen (1991 : 83), mengemukakan bahwa "efektifitas adalah pencapaian menurut perhitungan terbaik mengenai suasana dagang dan kemungkinan dari pada laba". Dari kedua pengertian efektifitas ini, efektifitas seharusnya diukur dengan suasana atau keadaan dan kondisi aktivitas usaha sehingga dapat menghasilkan keuntungan baik finansial maupun keuntungan dalam bentuk lain oleh organisasi. *Westra* dan Kawan-kawan (1991 : 108), mengemukakan bahwa efektifitas adalah : "suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaknya".

Kesimpulan yang dapat ditarik dari sejumlah pengertian efektifitas telah dikemukakan di atas nampak berbeda satu sama lain, namun jika diperhatikan secara lebih seksama keduanya mengandung tujuan dan sasaran yang sama dan ingin dicapai. *Westra* (1991 : 109) lebih lanjut mengemukakan bahwa "efektifitas adalah Keadaan atau berhasil suatu kerja yang dilakukan oleh manusia memberikan guna yang diharapkan.

Tercapainya efektifitas, pada umumnya dipakai empat pertimbangan, yaitu :

1. Pertimbangan ekonomi, misalnya jumlah atau mutu hasil.
2. Pertimbangan phsykologis, misalnya : akibat kerja terhadap kesehatan karyawan atau banyaknya kecelakaan jasmani, pengaruh kerja terhadap rasa letih, kesenadaan atau kekuasaan karyawan.

3. Pertimbangan sosial, misalnya : Kedudukan masyarakat atau kebahagiaan dan penyesuaian diri dalam kehidupan keluarga.

Westra dengan pengertian efektivitas tersebut tampak lebih luas sifatnya serta memiliki kriteria yang beragam dalam memandang efektivitas. Meskipun demikian inti yang dapat ditarik adalah bahwa efektivitas dapat dilihat dari sudut ekonomi, psikologis, dan sosial. Olehnya itu, pengertian efektivitas tersebut lebih memperjelas adanya perbedaan-perbedaan di dalam mengemukakan konsep efektivitas, yang disebabkan karena masing-masing ahli mengemukakan sesuai sudut pandangan dan kerangka acuan untuk menyinggung efektivitas yang berbeda-beda pula. *The Liang Gie* (1986 : 36) mengemukakan bahwa "Efektifitas mengandung arti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Jadi perbuatan seseorang yang efektif ialah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagai mana yang dikehendaki orang itu".

Berdasarkan uraian di atas, maka sejalan dengan pembahasan tesis ini nampak pengertian yang dikemukakan oleh *The Liang Gie* lebih tepat, karena diharapkan apabila pengelolaan data dan Informasi dilakukan secara efektif akan menimbulkan hasil guna yang diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pembangunan di daerah ini.



B. Konsep Pengelolaan

Dalam rangka pelaksanaan dari suatu kebijakan yang dikaitkan dengan konsep negara, maka setiap kita mengungkap mengenai pengelolaan terkonotasi sebagai suatu tindakan umum yang penting untuk mengembangkan suatu kegiatan, oleh karena itu dalam pelaksanaan dari sebuah kebijaksanaan yang terarah dengan tujuan yang hendak dicapai, tindakan pengelolaan harus benar-benar diperhitungkan secara cermat dan matang. *Poetranto* (1991 : 107) dalam buku "Manajemen Proyek Pembangunan" mengemukakan bahwa "Fungsi *Actuating* (pengelolaan/ Pelaksanaan) adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menggerakkan para peserta organisasi untuk mencapai sasaran-sasaran sesuai dengan perencanaan, termasuk memberikan inisiatif atau rangsangan dan hukuman, sanksi, inisiatif yang bertujuan memberikan motivasi para tenaga kerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan (*need*) mereka". *Prijono* (1992:23) yang mendefinisikan pengelolaan sebagai "Kegiatan-kegiatan pelaksanaan harus menuju kearah tujuan yang hendak dicapai dan tetap dalam arah kebijaksanaan yang ditetapkan. Dalam rangka pelaksanaan ini unsur-unsur dalam siklus manajemen adalah unsur pimpinan dan pengendalian, kedua unsur ini merupakan alat untuk menjamin bahwa pelaksanaan diarahkan kepada tujuan".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah salah satu fungsi manajemen, karena pengelolaan merupakan pelaksanaan dan penjabaran kebijaksanaan. Hal ini sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh *The Liang Gie et, al*, (1989 : 210), bahwa "Pengelolaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana pelaksanaannya, kapan waktu dimulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Lebih lanjut *Tjokroamidjoyo* (1995 : 98) mengemukakan bahwa : "Pengelolaan atau pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijaksanaan guna mencapai suatu tujuan maka kebijaksanaan itu diturunkan dalam program proyek". Dengan demikian dalam operasionalnya pengelolaan atau pelaksanaan dapat dirasakan perlu adanya penerapan dan fungsi manajemen yakni pelaksanaan kegiatan operasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pokok yang terdapat dalam kegiatan pengelolaan adalah :

- a. Proses kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana dan kebijakan yang sudah disusun sebelumnya.
- b. Dalam kegiatannya membutuhkan peralatan pendukung agar maksud dan tujuan dapat dicapai.

- c. Melibatkan pimpinan atau atasan sebagai unsur pengendali kegiatan agar menjamin tercapainya maksud dan tujuan.

C. Informasi.

Suatu sistem informasi tidak hanya merupakan serangkaian gagasan atau konsep, sistem informasi merupakan sistem operasional yang melaksanakan beraneka ragam fungsi untuk menghasilkan luaran yang berguna. Struktur sistem informasi didasarkan pada apa yang harus dikerjakan oleh satu sistem. (*Gordon B. Davis, 1994 : xiii*). Suatu sistem informasi dapat diuraikan sebagai terdiri dari komponen fisik, tetapi komponen fisik ini tidak menjelaskan sistem.

Sehubungan dengan informasi dalam organisasi, dikenal dengan sistem informasi formal dan sistem informasi nonformal. Informasi formal bagi sebuah organisasi terdiri dari suatu sistem formal yang berstruktur. Informasi formal yang disediakan organisasi tersedia bagi setiap orang yang diberi wewenang untuk memperoleh Informasi tersebut. Dengan kata lain hanya dengan sistem publik perolehan data adalah tergantung pada wewenang organisatoris yang tepat. Ada juga sistem nonformal tidak berstruktur yang umum, dalam arti bahwa sistem ini melayani semua orang dalam organisasi yang kebetulan berhubungan dengan sistem informasi. Arus informasi non formal terdiri atas pembicaraan telepon, pembicaraan tak

resmi, karangan yang diperoleh dari guntingan surat, kabar yang diedarkan dan sebagainya.

Selain sistem formal dan informasi, banyak sistem informasi yang juga terjadi diantara karyawan dalam organisasi. Misalnya seorang direktur bisa memelihara suatu buku catatan berisi data untuk pemakaian pembuatan keputusan. Sistem ini tidak didasarkan pada fungsi atau kedudukan tetapi pada orang yang menduduki posisi tersebut. Banyak Individu yang memiliki sistem informasi pribadi mereka sendiri yang beroperasi menurut suatu cara yang tidak berstruktur dalam organisasi. Melalui kontak pribadi mereka bisa memelihara suatu arus informasi yang terganfung pada individu yang menduduki posisi dan tidak pada posisi untuk mengolah data dan informasi.

Dengan demikian uraian di atas menggambarkan bahwa sistem informasi pribadi sangat mempengaruhi sistem informasi dalam organisasi., tetapi yang tersebut belakangan merupakan suatu bagian yang berarti dalam arus informasi organisasi. Di lain pihak pengaruh sistem informasi yang lengkap adalah untuk meningkatkan ruang lingkup sistem umum yang formal. Peningkatan ini mengurangi kebutuhan akan sistem umum nonformal, maupun sistem pribadi yang nonformal.

Kesulitan dalam sistem informasi yang nonformal adalah bahwa individu yang seharusnya memperoleh informasi mungkin tidak merupakan bagian sistem, seseorang yang sudah menduduki suatu kedudukan untuk



waktu tertentu dan mengembangkan suatu sistem informasi bisa menganggap sistem ini berguna baginya.

Yang penting diperhatikan dalam penerapan sistem informasi formal dalam organisasi adalah : (a) Data dan informasi harus merupakan fakta dan data yang sebenarnya; (b). Agar dapat dijadikan acuan dalam bertindak, data dan informasi harus aktual, valid dan dapat dipercaya; (c) . Data dan informasi tersebut agar benar-benar dapat mencapai sasaran, harus dikendalikan dengan baik sehingga sesuai tujuan-tujuan yang memanfaatkannya.

D. Konsep Pembangunan

Pembangunan yang dilaksanakan setiap negara berkembang mempunyai perbedaan dalam hal penerapan strategi maupun kebijakan, karena adanya perbedaan kondisi geografis dan kondisi masyarakat bangsa yang bersangkutan. Meskipun demikian pembangunan yang dilaksanakan secara global merupakan suatu proses kegiatan yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

Menurut *Todaro* (2000 : 20) pembangunan adalah proses multi dimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*) dan pemberantasan kemiskinan *absolut*.

Denis Goulet (Todaro, 2000 : 19) mengemukakan adanya tiga komponen dasar atau nilai-nilai yang seharusnya terdapat dalam konsep dan petunjuk praktis untuk memahami arti hakikat pembangunan yaitu : (1) menunjang kelangsungan hidup, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar; (2) Harga diri, kemampuan untuk menjadi seorang manusia; (3) kemerdekaan dari penjajah dan perbudakan dan kemampuan untuk memilih. Sedangkan *Bryant dan White (1987 : 22-26)* mengemukakan agar pembangunan diartikan sebagai peningkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya. Pembangunan sebagai salah satu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan. Untuk itu implikasi dalam pelaksanaan pembangunan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas (*capacity*) manusia dalam menentukan sendiri masa depannya.
2. Pembangunan sebagai suatu proses yang menitik beratkan aspek keadilan (*equity*) dalam distribusi pendapatan dan kesempatan untuk menikmati hasil.
3. Pembangunan sebagai proses pertumbuhan kekuatan (*empowerment*) bagian segenap masyarakat untuk bertindak dalam skala yang lebih besar.
4. Pembangunan harus mempertimbangkan kelangsungannya dengan memberi perhatian yang besar terhadap dukungan lingkungan.

5. Pembangunan merupakan proses untuk menciptakan saling ketergantungan (*interdependency*) bukannya ketergantungan yang bersifat satu arah.

Sejalan dengan hal tersebut *Wahyudi Komorotomo* (1991 : 89) mengemukakan bahwa : "Pembangunan adalah proses perubahan dari suatu keadaan tertentu kearah keadaan lain yang lebih baik". Pembangunan nasional Indonesia selama 30 tahun terakhir sudah mulai berhasil mengangkat taraf kemakmuran ekonomi masyarakat. Akan tetapi prestasi ini tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan dipandang dari aspek-aspek sosial dan nilai-nilai demokrasi. Pelaksanaan pembangunan komunitas pada skala luas hanya menghasilkan tidak lebih dari seperangkat program dan target baru yang dirumuskan dari pusat dengan pelaksanaan struktur-struktur birokrasi yang konvensional dan tidak dianggap terhadap *preferensi* atau kebutuhan-kebutuhan rakyat setempat.

Berdasarkan pengertian pembangunan yang sudah dikemukakan di atas, maka pengertian pembangunan yang dikemukakan oleh *Bryan* dan *White* dapat dijadikan acuan pembahasan dalam tesis ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dapat memberi kontribusi yang diharapkan ada baiknya dihindari sejumlah faktor sebagai berikut :

- a. Ketergantungan pada organisasi-organisasi birokrasi yang terpusat yang hanya mempunyai sedikit kemampuan untuk menanggapi beraneka

kebutuhan khas masyarakat. Ketergantungan ini juga nampak dalam perencanaan dan pelaksanaan partisipatif.

- b. Inventasi yang tidak memadai dalam proses pengembangan kemampuan komunitas untuk memecahkan masalah.
- c. Perhatian yang kurang dalam menangani keanekaragaman masyarakat, terutama dalam hal struktur sosial masyarakat pedesaan.
- d. Tidak cukupnya integrasi antara komponen-komponen teknis dengan sosial dalam upaya-upaya pembangunan.

Terwujudnya efektivitas pengelolaan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi agar mampu mendukung penyusunan program pembangunan ekonomi harus dilakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Data pada dasarnya adalah kumpulan keterangan yang diharapkan dapat memberi gambaran tentang suatu keadaan pada suatu situasi tertentu. Dalam petunjuk Operasional Penyusunan Laporan, data diartikan sebagai : "Sekumpulan Keterangan yang biasa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau permasalahan (1993 : 21)". Dengan demikian suatu data dapat merupakan sekumpulan data yang berbentuk angka dan tidak berbentuk angka-angka.

Gaspersz (1989 : 13) mengemukakan bahwa data adalah bahan baku yang harus diolah sedemikian rupa sehingga berubah sifatnya sebagai informasi". Sedangkan *Onong Uchjana* (1989 : 66) mengemukakan pengertian data sebagai "bahan mentah yang diproses untuk menyajikan informasi". Suatu data yang telah tersusun sedemikian rupa dapat merupakan informasi penting bagi seseorang yang membutuhkan. Untuk itu, data senantiasa diformulasikan dengan baik dan benar sesuai kadar kebutuhannya saat itu sehingga apabila sampai kepada pihak yang memerlukan dapat dijadikan informasi bagi tindakan penyebaran selanjutnya.

Dalam pelaksanaan pengumpulan data, terdapat dua faktor yang berpengaruh, yaitu :

1. Sarana dan Prasarana

Sarana menurut *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (1993 : 80) adalah : "segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk mencapai tujuan"; Sedangkan *Yosef Riwu Kaho* (1988 : 185) mengemukakan pengertian sarana atau peralatan sebagai berikut : "Sarana atau peralatan adalah menyangkut perangkat keras (*hard-ware*) seperti gedung/ruang, peralatan perkantoran (mesin ketik/komputer, kertas, meja, kursi, lemari dan seterusnya, serta peralatan komunikasi dan transportasi. Dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan

sarana dan prasarana penting diperhatikan sehingga dapat mengelola data dan informasi yang akurat dan valid.

2. Sumber Daya Manusia

Membicarakan sumberdaya manusia, tidak terlepas kaitannya dengan kemampuan aparat dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Menurut *Moekijat* (1991 :12), Sumberdaya manusia (SDM) dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu sumber daya manusia aparatur/pegawai dan sumber daya manusia non aparatur atau masyarakat.

1. SDM aparatur mempunyai kedudukan yang sangat penting karena mereka sekaligus melaksanakan fungsi sebagai perumus, perencana, pelaksana dan pengawas pembangunan. Untuk itu sumber daya manusia aparatur pemerintah harus bersih dan berwibawa.
2. sumber daya manusia masyarakat. Masyarakat memegang peranan penting karena pada dasarnya pembangunan tidak akan berhasil apabila tidak ada partisipasi masyarakat.

Sedangkan menurut *Buchari Zainun* (1995 : 58), sumber daya manusia mengandung dua pengertian, yaitu : (1) Adalah usaha kerja/jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan seseorang dalam waktu singkat untuk menghasilkan sesuatu; (2) Sumber daya manusia adalah menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk menghasilkan jasa

usaha berarti mampu menghasilkan sesuatu yang mempunyai arti bagi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, selain sarana pengelolaan data dan Informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mengelola data secara efektif dan efisien.

b. Analisis dan Penilaian

Sesuatu yang menarik perhatian dan diminati seseorang mendorong untuk diketahui lebih mendalam dan rinci. Agar maksud tersebut dapat tercapai maka diperiukan tindakan analisis yang merupakan rangkaian kegiatan baik berupa cara berpikir yang logis, rasional dan sistematis dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan menunjang melakukan pengkajian, penelaahan, dan penguraian sehingga dapat mengungkap masalah yang ingin diketahui. *Komaruddin (1994 : 31)*, mengenai pengertian analisis mengemukakan bahwa "Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan. Dengan demikian, Komaruddin menekankan pada tindakan menguraikan sesuatu hingga menjadi komponen yang lengkap menunjukkan tanda-tanda dan hubungan dari masalah yang dianalisis.

Memperjelas pengertian analisis, Soejadi (1995 : 107) mengemukakan mengenai sebagai berikut : "Analisis dapat dirumuskan sebagai rangkaian kegiatan pemikiran yang logis, rasional, sistematis, dan obyektif dengan menerapkan teknologi atau teknik ilmu pengetahuan untuk melakukan pengkajian, penelaahan, penguraian, perincian dan pemecahan suatu obyek atau sasaran. Dibanding dengan pengertian Komaruddin nampak bahwa Soejadi menekankan pengertian analisis lebih lengkap dan terperinci. Walaupun demikian, apa yang ingin diungkap kedua ahli tersebut adalah sama pada satu titik tujuan yang ingin dicapai.

Walaupun kedua pengertian di atas dapat dijadikan pegangan menyangkut pengertian analisis, namun penulis lebih cenderung mengacu pada pendapat *The Liang Gie* (1989 : 26) sebagai berikut : "Analisis adalah segenap rangkaian perbuatan pikiran yang menelaah sesuatu hal secara mendalam, terutama mempelajari bagian-bagian dalam suatu kebulatan untuk mengetahui ciri masing-masing bagian, hubungannya satu sama lain dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat itu.

Jika dicermati pengertian tersebut di atas, maka dalam pengertian analisis terdapat beberapa unsur penting, yaitu : (1) Merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang didasari atas pikiran yang logis mengenai suatu hal yang ingin diketahui; (2) Mempelajari bagian perbagian secara rinci dan cermat-sehingga apa yang ingin diketahui menjadi gambaran

yang utuh dan jelas. (3) Dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi untuk memudahkan kegiatan; (4) Ada tujuan yang hendak dicapai.

Dalam analisa dan penilaian pengelolaan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan, dilakukan melalui :

1. Pencatatan

Pencatatan adalah merupakan proses memindahkan bukti-bukti kegiatan yang terpisah-pisah dalam satu wadah sesuai dengan tujuan-tujuan dilaksanakan pencatatan. Dalam proses pengelolaan data dan informasi untuk pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan, pencatatan dilakukan terhadap perkembangan pelaksanaan proyek yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Tujuan dari pada pencatatan yang dilakukan, adalah agar dapat diketahui sejauhmana penggunaan dana tersebut. Untuk itu dalam pencatatan yang dilaksanakan semua sisi penggunaan anggaran dicatat dengan baik sehingga dapat menjadi satu laporan ke tingkat atas terhadap penggunaan dana untuk kegiatan proyek pembangunan di daerah Sulawesi Selatan.



2. Penilaian

Setelah proses pencatatan selesai dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan penilaian. Penilaian dilakukan terhadap hasil-hasil pencatatan dari pelaksanaan proyek apakah sesuai dengan keadaan dan bukti-bukti yang diterima atau sebaliknya. Apabila terdapat bukti-bukti yang tidak sesuai, maka dilakukan rekapitulasi ulang untuk mencari kebenaran dan membenaran atas bukti-bukti yang sah sehingga dapat dilakukan klarifikasi terhadap pencatatan yang dianggap keliru.

c. Pelaporan

Untuk mengembangkan suatu kegiatan sangat dibutuhkan laporan, karena dengan laporan akan dapat tergambar dengan jelas mengenai kondisi organisasi. Melalui laporan akan data dinilai kemampuan suatu instansi atau perusahaan untuk memenuhi rencana-rencana yang sudah disusun serta kemajuan-kemajuan yang sudah diperoleh dalam kegiatan yang dilaksanakannya.

Laporan sebenarnya merupakan produk akhir dari setiap proses/kegiatan dalam suatu organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa proses penyusunan laporan meliputi kegiatan-kegiatan :

1. Mengumpulkan bukti-bukti yang sah;
2. Menganalisa bukti-bukti tersebut (verifikasi);
3. Mencatat;

4. Meringkas
5. Menyusun dan menganalisa laporan.

Melalui laporan tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan terutama pimpinan organisasi akan dapat melihat perkembangan organisasi, selanjutnya dapat menyusun suatu rencana dan kebijaksanaan yang lebih baik, sehingga selanjutnya diharapkan hasil kegiatan yang dilakukan akan memberikan manfaat bagi organisasi. Selain itu, melalui laporan, pimpinan juga dapat mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pentingnya laporan dalam suatu organisasi, dikemukakan oleh Myer dalam bukunya *Financial Statement Analysis* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "laporan adalah dua daftar yang disusun oleh organisasi pada akhir periode untuk suatu organisasi. Kedua daftar tersebut meliputi kegiatan pokok dan kemajuan yang sudah dicapai. Dengan demikian, laporan dimaksudkan akan memberikan gambaran tentang kemajuan (*progress report*) secara periodik yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Dalam pelaporan pengelolaan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui : --

1. Meringkas

Agar pelaporan dapat efektif dan benar-benar dapat menjadi pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan, maka diperlukan ringkasan pencatatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Peringkasan dilakukan melalui :

- a. Menyatukan dan mengklasifikasi data kegiatan proyek yang sejenis.
- b. Menyatukan dan mengklasifikasi setiap jenis dana yang dikeluarkan dan digunakan dalam kegiatan proyek.
- c. Mengklasifikasi data menyangkut penundaan pelaksanaan proyek yang sedang dan akan dilakukan kemudian.

Kegiatan peringkasan terhadap data penting dilakukan karena selain dapat memudahkan pimpinan dalam menentukan kebijakan pelaksanaan proyek, juga akan dapat dijadikan bahan dan masukan sejauhmana pelaksanaan proyek dapat terselenggara sesuai rencana yang sudah disusun.

2. Menyusun

Proses selanjutnya dari pelaksanaan laporan adalah kegiatan menyusun data-data yang sudah diringkaskan. Penyusunan kembali perlu dilakukan, karena dalam meringkas data dan informasi pelaksanaan proyek baik menyangkut persentase pelaksanaan dan kemajuannya maupun jumlah

dana yang dikeluarkan belum berbentuk suatu data dan informasi yang layak untuk dijadikan laporan.

Menyusun kembali data dan informasi sebagai bahan laporan harus dilakukan secara efektif, efisien dan tepat waktu karena benar-benar dibutuhkan untuk keperluan pemantauan kegiatan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di Propinsi Sulawesi Selatan.

d. Publikasi Data

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan nasional keberhasilannya sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang dan sesuai dengan kondisi daerah karena jika perencanaan tidak disusun dengan efektif dan efisien, pembangunan yang dilaksanakan tidak akan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang didambakan. Untuk itu, pembangunan daerah seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia, dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Seperti telah dikemukakan bahwa pembangunan yang terpusat yang dicanangkan selama orde baru telah membawa dampak yang kurang baik bagi pembangunan di daerah, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dapat diwujudkan sampai saat ini. Menyadari hal tersebut, maka pemerintah pasca reformasi telah mengupayakan untuk mewujudkan

pemerataan pembangunan di daerah-daerah Indonesia dengan melaksanakan otonomi secara penuh,

Pentingnya pengelolaan data dan Informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2000 – 2004, pada Bab IV tentang Strategi dan Arah Kebijakan Sub bab (1) tentang Pembangunan Daerah sebagai berikut :
"Pengelolaan informasi dan pengendalian pembangunan daerah dititik beratkan untuk meningkatkan interkoneksi fungsional yang bersifat strategis dari semua tatanan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan baik yang berbasis pada wilayah maupun yang berbasis fungsional.

Berdasarkan hal di atas, maka kegiatan pengelolaan data dan informasi khususnya dalam rangka penguatan otonomi di Propinsi Sulawesi selatan harus dilaksanakan secara konsisten, terpadu dan searah dengan kebijakan pembangunan dan pengembangan daerah

Dalam publikasi data, ada tiga faktor yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Koordinasi.

Koordinasi dalam publikasi data penting dilakukan agar dapat mempublikasikan data-data tidak terjadi tumpang tindih antar instansi terkait. Peran koordinasi terhadap analisis dan publikasi data dan informasi Biro Bina

Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, dilakukan melalui :

a) Koordinasi Hasil Pembangunan

Pada publikasi Hasil pembangunan pada data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi melaksanakan dan mempublikasikan hasil-hasil pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya serta fisik dan perasarana, dengan melakukan kegiatan :

- 1) Menyiapkan bahan untuk publikasi
- 2) Melakukan atau mengkoordinasikan materi publikasi di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana serta mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan instansi lainnya.

b). Koordinasi Bidang ekonomi

Publikasi Bidang ekonomi dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pengumpulan data terhadap kegiatan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha. Koordinasi bidang ekonomi dilakukan melalui :

- 1) Kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.



- 2) Mengkoordinasikan dan memadukan hasil pengumpulan informasi pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh dinas-dinas daerah, satuan-satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal daerah tingkat II dan badan-badan lain yang ada dalam wilayah daerah.
- 3) Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
4. Mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha dalama rangka pelaksanaan REPELITA daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan.

c) Koordinasi Bidang Sosial Budaya

Bidang sosial budaya dikoordinasikan melalui kegiatan perencanaan pembangunan berupa pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan. Kegiatan koordinasi ini dilakukan melalui kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan- dan komunikasi serta kependudukan.

- 1) Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan yang disusun oleh dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi vertikal, daerah-daerah kabupaten/kota dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah daerah.
 - 2) Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
 - 3) Mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.
- d) Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana

Dibidang ini, koordinasi dilakukan melalui kegiatan penyusunan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber alam dan lingkungan hidup. Koordinasi dengan pemerintah daerah adalah dalam bentuk memadukan rencana pembangunan yang dibuat oleh dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah, instansi-instansi

vertikal, daerah-daerah tingkat II dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah daerah.

2. Pengelompokan

Sebelum kegiatan publikasi dilakukan, terlebih dahulu data-data dan fakta yang sudah diolah dikelompokkan menurut jenis dan kepentingannya. Hal ini penting dilakukan agar khalayak atau pihak-pihak yang memerlukan dapat menerima informasi sesuai dengan kebutuhannya secara efektif dan efisien.

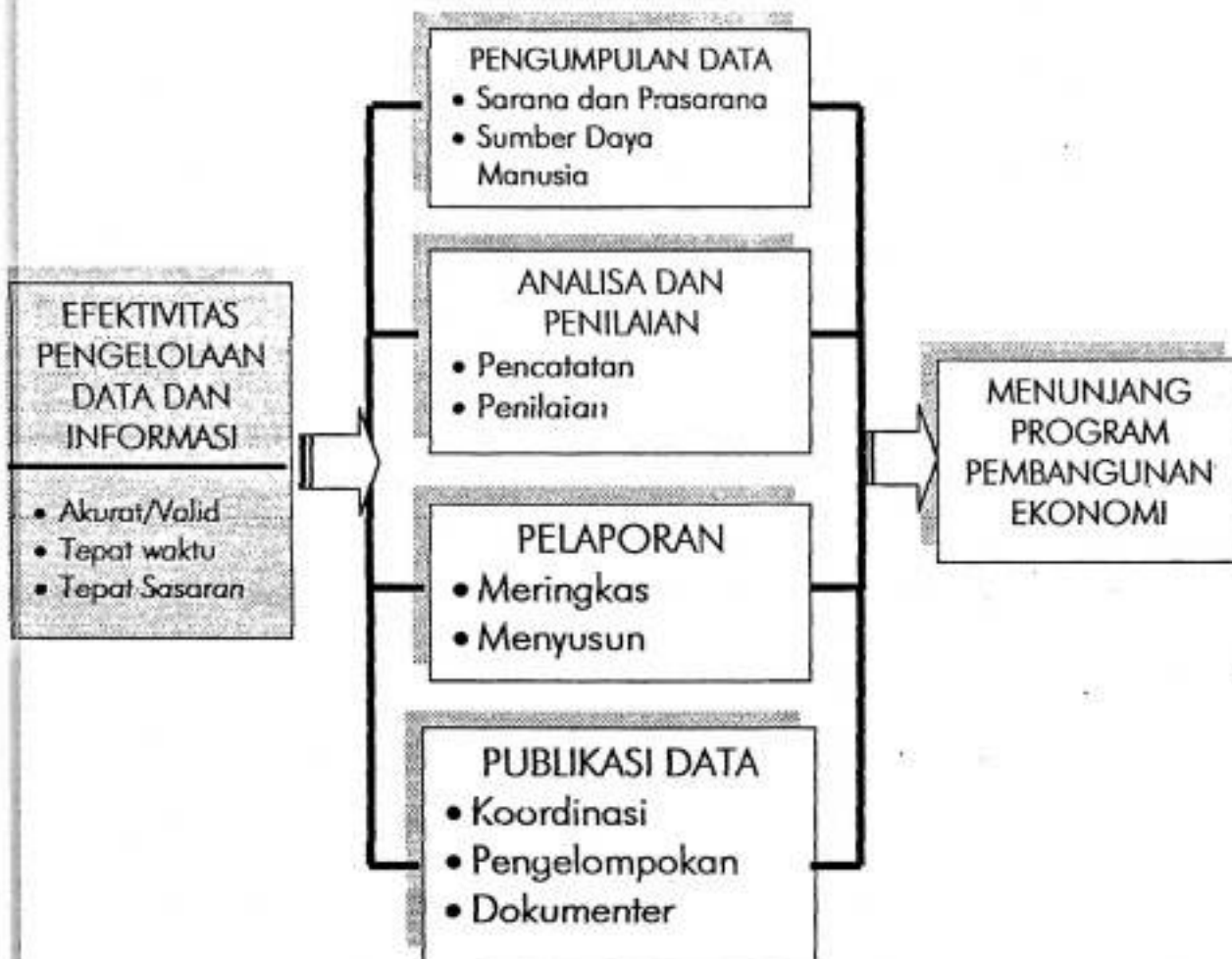
3. Dokumenter

Kegiatan selanjutnya setelah publikasi data dilakukan adalah membuat dokumenter dari seluruh data-data yang sudah dipublikasikan pada satu tempat/file yang mudah dibuka sewaktu-waktu data tersebut dibutuhkan kembali.

Berdasarkan uraian yang sudah dilakukan, maka diketahui bahwa pengelolaan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari empat tahap yaitu (a) tahap pengumpulan data; (b) tahap analisa dan penilaian; (c) tahap pelaporan; (d) Tahap publikasi data.

Apabila tahapan pengelolaan data dan informasi dapat lebih efektif, akan menunjang program pembangunan ekonomi di daerah ini. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pemikiran dikemukakan sebagai berikut :

E. KERANGKA PEMIKIRAN



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini adalah pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mengungkap efektivitas pengelolaan data dan informasi dalam perencanaan program pembangunan bidang ekonomi. Dipilihnya lokasi ini dengan fokus pada pengelolaan data Informasi dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengelolaannya masih mengalami hambatan dan kendala.

B. Unit Analisis

Menurut Suharsimi Arikunto (1998 : 132) yang dimaksud "unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian, yang dapat berupa benda atau manusia". Sehubungan dengan penelitian yang diadakan, maka unit analisis yang ditetapkan adalah lembaga/organisasi Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah : 69 orang yang akan diteliti sebagai sumber data dan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan informan yang ditetapkan adalah :

- 1) Kepala Biro : 1 orang
- 2) Kepala Bagian : 4 orang
- 3) Asisten Ekonomi Pembangunan dan Keuangan : 1 orang
- 4) Kasubag : 12 orang

Karena jumlah populasi cenderung kecil, maka dalam penelitian ditetapkan seluruh populasi responden menjadi obyek penelitian atau sampel jenuh.

C. Metode Pengumpulan Data

Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner/angket dan penelusuran dokumentasi.

1. Wawancara

Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari informan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Wawancara dilakukan dalam bentuk wawancara berpedoman, yaitu wawancara yang dituntun oleh sejumlah pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu (*interview guide*). Wawancara dilakukan dengan : (1) Kepala Biro (2) Kepala Bagian (3) Asisten

2. Kuesioner/Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan atas pokok permasalahan dengan mengacu pada variabel-variabel penelitian. Angket ini telah diikuti sejumlah jawaban yang akan dipilih oleh responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mencari keterangan atau pengumpulan data sekunder menyangkut pokok permasalahan mengenai pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan .

Sedangkan menurut sumbernya, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan atas :

1. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber lain seperti laporan-laporan, kepustakaan dan lain-lain.
2. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari obyek penelitian yang dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan, yang antara lain meliputi :
 - a. Jenis informasi
 - b. Proses pengelolaan informasi
 - c. Unit kerja yang terlibat

D. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana data yang dikumpulkan di lapangan khususnya dari kuesioner, dideskripsikan dan dituangkan kedalam tabel distribusi frekuensi dan persentase. Untuk memudahkan analisis, pertanyaan (angket) yang diajukan kepada responden diberi gradasi dari sangat positif hingga sangat negatif, seperti sangat setuju, setuju, Kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, atau sangat baik, baik, kurang baik tidak baik, sangat tidak baik, serta gradasi lain sesuai pertanyaan angket yang diajukan. Pemberian skore mulai dari nilai tertinggi dengan skore 4 hingga nilai terendah dengan skore 1.

Selanjutnya rekapitulasi skore dibuat berdasarkan interval nilai persentase sebagai berikut:

1	-	25 %	sangat Kurang baik
26	-	50 %	Kurang baik
51	-	75 %	Baik
76	-	100 %	Sangat baik

Kriteria efektif dari jawaban responden ditentukan apabila berada pada hasil persentase antara 75 sampai dengan 100 %.

F. Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian terdiri dari dua variabel yaitu :

1. Variabel Bebas (*Dependent Variabel*)

Variabel bebas pada penelitian ini adalah Efektivitas pengelolaan data dan informasi berupa rangkaian kegiatan dengan maksud menyimak, mempelajari, kegiatan dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi oleh Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan. Efektivitas yang dimaksud adalah tercapainya hasil pengelolaan data dan informasi berupa : (a) data yang akurat/valid; (b) Tepat waktu; (c) tepat sasaran. Untuk mewujudkan efektifitas pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui :

a. Pengumpulan Data

Adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi di lapangan menyangkut data dan informasi bidang ekonomi, bidang pengembangan kelembagaan, bidang pengendalian pembangunan, dan bidang pengembangan sumber daya alam, serta data dan informasi pengendalian pembangunan. Indikator yang diukur adalah:

- 1) Sarana dan prasarana atau peralatan yang digunakan dalam proses pengelolaan data dan informasi, seperti komputer, fax, printer, telepon dan lain-lain.

- 2) Sumber daya manusia, adalah aparat atau pegawai yang terlibat dalam pengelolaan data dan informasi

b. Pelaporan

Adalah tindak lanjut dari tindakan pengumpulan data dimana data-data yang sudah diperoleh disusun dalam bentuk data dan informasi kemudian disampaikan kepada atasan atau bagian untuk dikelola lebih lanjut. Indikator yang diukur adalah :

- 1) Meringkas, yaitu proses meneliti, mengkaji kemudian menyimpulkan data dan informasi dalam satu bentuk yang lebih jelas, ringkas dan lebih fleksibel.
- 2) Menyusun, merupakan rangkaian kegiatan mencocokkan dan menempatkan data dan informasi sesuai dengan jenis dan tujuannya.

c. Analisa dan Penilaian

Adalah proses kegiatan untuk membuktikan keabsahan, kevalidan dan keakuratan data dan informasi dari laporan yang sudah diterima.

Indikator yang diukur adalah :

- 1) Pencatatan, merupakan proses memindahkan data dan informasi yang sudah diolah ke dalam wadah (format) pencatatan yang sudah disediakan sebelumnya terhadap seluruh data dan informasi.

- 2) Penilaian, adalah merupakan proses pemeriksaan dan pembenaran dari data-data yang sudah dicatat untuk dijadikan suatu laporan kepada pihak yang memerlukan.

d. Publikasi data

Adalah proses menyampaikan atau menyebar luaskan data dan fakta serta informasi yang sudah diyakini kevalidan dan keakuratannya kepada lembaga/instansi dan badan serta masyarakat yang memerlukan. Indikator yang diukur adalah :

- 1) Koordinasi, merupakan proses kegiatan untuk menyatu padukan rencana dan kegiatan dalam rangka pencapaian informasi yang akurat dan valid serta tepat waktu antar unit kerja terkait,
- 2) Pengelompokan, adalah proses membagi-bagi jenis data dan informasi sesuai peruntukannya.
- 3) Dokumenter, adalah penyimpanan informasi yang sudah dibakukan dalam bentuk file (disket) maupun dalam bentuk laporan (dokumen).

B. Variabel Terikat (*Independent Variable*)

Adapun variabel terikat pada penelitian yang diadakan adalah berupa kelancaran pelaksanaan program pembangunan apabila pengelolaan data dan informasi dapat dilakukan dengan efektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Tugas dan Fungsi

Biro Bina Perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, konsultasi dan pengkajian dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan pembinaan pengembangan perekonomian daerah, serta melaksanakan koordinasi pembinaan dalam pengadministrasian program pembangunan dalam lingkup Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan pengendalian administrasi pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Biro Bina Perekonomian dan pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan pengkajian kinerja perekonomian daerah dalam rangka perumusan kebijaksanaan pengembangan perekonomian daerah serta melakukan pembinaan dan pemantauan.
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam sinkronisasi, keterpaduan pelaksanaan dan peningkatan kinerja pembangunan perekonomian

daerah serta peningkatan peran lembaga ekonomi dan badan-badan usaha.

- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam perumusan pembakuan dan sosialisasi pedoman standarisasi dan perizinan serta melakukan pembinaan dan pemantauan.
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam penggalangan dan pelaksanaan kerjasama ekonomi serta melakukan pembinaan dan pemantuan pelaksanaannya.
- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penilaian dan pengolahan administrasi program pembangunan dalam lingkup Sekretariat Provinsi.
- f. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan pengkajian dalam perumusan kebijaksanaan dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah serta melakukan pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan.

2. Visi dan Misi

Menyimak tugas pokok dan fungsinya, maka visi Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan adalah : "terwujudnya pelayanan yang optimal untuk mendorong pembangunan yang handal dan perkembangan perekonomian yang lebih maju dan mandiri".



Visi adalah merupakan penetapan tujuan jangka panjang yang ingin diwujudkan sebagai bagian dari rencana. Sebagai suatu rencana jangka panjang visi harus mengandung suatu kekuatan untuk melihat kedepan secara rasional dengan mempertimbangkan kemampuan dan tujuan organisasi

Adapun misi Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Mendorong peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam yang efektif dan efisien.
2. Mewujudkan kerjasama ekonomi, baik dalam maupun luar negeri.
3. Penajaman Program Grateks-2 menjadi Ekspan-2001 sebagai program realistis dan pragmatis.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan kebijaksanaan dan pedoman pelaksanaan pembangunan sesuai Propeda dan GBHD Sulawesi Selatan.

Berdasarkan misi di atas, bahwa Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugas pokoknya berupaya merealisasikan tujuan-tujuan stratejik organisasi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pembangunan terhadap semua sektor sesuai potensi masing-masing

- b. Berupaya untuk menjalin kerjasama ekonomi kepada seluruh pelaku ekonomi.
- c. Meningkatkan pendapatan asli daerah

3. Sasaran Organisasi

Agar mampu memberi kontribusi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah di Daerah Sulawesi Selatan, sasaran organisasi mencakup :

- a. Terbentuknya BUMD di beberapa Dinas/Badan
- b. Terselenggaranya kerjasama dengan trade center di setiap kawasan untuk mencari peluang pasar di luar negeri
- c. Terbentuknya kerjasama ekonomi antar propinsi dan antar negara
- d. Meningkatkan nilai ekspor sebagai program yang realistis dan programatis
- e. Meningkatnya produksi komoditi andalan Sulawesi Selatan
- f. Terbentuknya pola distribusi yang tepat untuk berbagai komoditi
- g. Terbentuknya pelaksanaan program yang tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran
- h. Terselenggaranya sistem pemantauan program pembangunan secara periodik (berkala)
- i. Terwujudnya sistem pelaporan yang aktual dan tepat waktu
- j. Terwujudnya evaluasi program yang menjadi dasar penyusunan program berikutnya
- k. Terselenggaranya koordinasi antar instansi yang terpola

B. Pengelolaan Data dan Informasi pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

1. Pengumpulan Data

Tugas pokok Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan adalah melaksanakan koordinasi, konsultasi dan pengkajian dalam perumusan kebijaksanaan dan pembinaan pengembangan perekonomian daerah, serta melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka pengadministrasian program pembangunan dalam lingkup Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan pengendalian administrasi pembangunan daerah.

Agar dapat berjalan tugas pokok tersebut, salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan adalah pengumpulan data yang akan dijadikan bahan bagi pengkajian dan perumusan kebijaksanaan untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian daerah. Data yang dikumpulkan adalah meliputi data bidang ekonomi, sarana perekonomian, dan data bidang produksi serta distribusi. Melalui pengumpulan data, diharapkan diperoleh gambaran mengenai kinerja bidang perekonomian daerah yang dapat dijadikan dasar peningkatan perekonomian daerah pada waktu yang akan datang. Pentingnya data dikumpulkan menyebabkan pendataan harus dilaksanakan dengan baik karena dapat menjadi dasar bagi terselenggaranya koordinasi, konsultasi dan pengkajian bagi pengembangan perekonomian daerah Sulawesi Selatan.

Dari peninjauan yang dilakukan, ada kecenderungan pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan belum dapat dilaksanakan pengumpulan data secara optimal. Distribusi jawaban responden terhadap hal ini, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Pengumpulan data dan Informasi

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Selalu Dilakukan	4	16	64	23,19
2	Cukup dilakukan	3	25	75	36,23
3	Kurang dilakukan	2	28	54	40,58
4	Tidak dilakukan	1	--	--	---
Jumlah			69	193	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Dari tabel 1 (satu) di atas, jawaban responden adalah kurang dilakukan, yaitu 40,58 %, dan paling rendah menjawab selalu dilakukan yaitu sejumlah 23,19 % serta yang menanggapi cukup dilakukan sejumlah 36,23 %. Gambaran di atas menunjukkan bahwa pengumpulan data pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan masih harus dioptimalkan.

Proses pengumpulan data pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan melaksanakan pendataan pada setiap unit kerja, dan instansi terkait melalui pendataan secara langsung maupun dengan meminta laporan-laporan mengenai kegiatan yang sudah dilakukan dan rencana kegiatan yang akan

dilakukan pada tahun anggaran yang akan berjalan. Data yang diperoleh dari instansi dan unit kerja tersebut dianalisa dan diseleksi kemudian diproses lebih lanjut untuk menyusun kerangka laporan mengenai kemajuan maupun hambatan setiap sektor kegiatan ekonomi dalam satu periode. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pelaksanaan koordinasi, konsultasi serta pengkajian agar diwujudkan sinkronisasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi dan administrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Belum optimainya pendataan dilakukan akan dapat mempengaruhi kevalidan laporan yang disusun menyebabkan sulit mengukur kinerja sektor pembangunan ekonomi dan administrasi pembangunan lingkup Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan keterangan informan menunjukkan pelaksanaan pengumpulan data masih kurang baik sehingga dalam menata dan memberdayakan data sektor ekonomi dan administrasi untuk dijadikan bahan informasi pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, belum mencerminkan suatu informasi yang akurat yang menggambarkan kondisi sesungguhnya terhadap pelaksanaan sektor pembangunan dan sektor perekonomian serta administrasi pembangunan di daerah ini.

Penelitian yang diadakan menunjukkan ada kecenderungan pengumpulan data pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan masih kurang baik, adalah karena :

- a. Studi kelayakan terhadap potensi sarana maupun sumber daya perekonomian di daerah masih kurang dilaksanakan, sehingga data yang disusun hanya didasarkan atas angka/data yang cenderung sudah kadaluarsa (data tahun sebelumnya), sehingga kurang menggambarkan keadaan dan kondisi gerak kegiatan serta kemajuan pelaksanaan perekonomian di daerah ini.
- b. Masukan data terhadap potensi sektor ekonomi dari daerah kurang mencerminkan hal yang obyektif dan valid sehingga tidak dapat dijadikan dasar penyusunan rencana untuk pengoptimalan dan pemberdayaan potensi guna pengendalian pembangunan bidang ekonomi daerah.
- c. Aparat dalam pengumpulan data kurang kemampuannya untuk mengarahkan dan mewujudkan suatu kerangka acuan pelaksanaan pengumpulan data yang mantap dan berimbang antara kepentingan daerah dengan pelaksanaan tugas pokok Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia tidak didukung latar belakang pendidikan yang memadai (sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan formal SLTA), serta tidak ditunjang pengalaman yang baik, karena lebih banyak pegawai yang baru ditempatkan pada bidang ini. Hal ini berdampak pada kecepatan dan percepatan pekerjaan yang belum dapat diwujudkan dengan baik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi sehingga pengumpulan data masih kurang dilaksanakan adalah persiapan pelaksanaannya belum terselenggara dengan baik. Persiapan pelaksanaan pengumpulan data cenderung masih kurang baik sehingga kegiatan pengumpulan data belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

Berdasarkan angket yang diedarkan secara terbuka, nampak responden lebih banyak menyatakan bahwa persiapan pengumpulan data belum dilaksanakan dengan baik oleh Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan. Persiapan pendataan yang masih kurang menyebabkan pengelolaan data dan informasi belum sepenuhnya dapat diperoleh data akurat dan valid menyangkut penyelenggaraan pembangunan sektor perekonomian di daerah ini. Distribusi jawaban responden terhadap persiapan pelaksanaan pendataan, dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Persiapan Pelaksanaan Pengumpulan data dan Informasi

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Selalu Dilakukan	1	10	40	14,50
2	Cukup dilakukan	3	14	42	20,30
3	Kurang dilakukan	2	41	82	59,42
4	Tidak dilakukan	1	4	4	5,78
Jumlah			69	168	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003



Dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dominan responden memberi jawaban persiapan pelaksanaan pendataan masih kurang dilakukan, yaitu sejumlah 59,42 %, dan paling rendah menjawab tidak dilakukan sejumlah 5,78 %. Hal ini menggambarkan bahwa persiapan pendataan belum dilaksanakan secara optimal dalam pelaksanaan pengumpulan data. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa persiapan pelaksanaan pengumpulan data belum dilakukan dengan baik oleh aparat Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan yang mempengaruhi proses pelaksanaan pengumpulan data. Persiapan pelaksanaan pengumpulan data penting dilakukan karena akan disusun tahapan pelaksanaan pengumpulan data, seperti : (a) jadwal waktu pengumpulan data; (b) jenis-jenis data yang dibutuhkan; (c) lokasi/obyek pengumpulan data (daerah atau instansi/unit kerja), dan lain-lain. Kurangnya persiapan mengakibatkan proses pendataan tidak dapat dilaksanakan secara matang, yang pada akhirnya pendataan kurang efektif dan tidak dapat menghasilkan data sektor perekonomian yang akurat dan valid seperti yang diharapkan.

Dari wawancara terungkap bahwa persiapan pengumpulan data seharusnya dilaksanakan dengan baik mengingat data yang dikumpulkan sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis dari unit-unit kerja terkait. Kurangnya persiapan pelaksanaan pendataan menyebabkan:

- a. Pelaksanaan pendataan tidak terpola dan tidak jelas waktu dan pelaksanaannya sehingga pada setiap akhir (periode) anggaran aparat kewalahan mencocokkan data dan informasi yang diperoleh dengan kebutuhan untuk menyusun rencana pembangunan.
- b. Pendataan yang dilakukan tidak akurat bahkan cenderung dilakukan berulang-ulang karena ada data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan kebutuhan.
- c. Keakuratan data tidak dapat dijamin, karena terdapat sejumlah data yang pada dasarnya merupakan data dan informasi pembangunan yang sudah terdata.

Dari penelitian ditemukan bahwa pada pengelolaan data persiapan harus dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Waktu pengumpulan data/informasi mengenai sarana dan prasarana pembangunan sektor perekonomian, data pelaksanaan proyek-proyek sektor ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya, penganggaran dan lain-lain yang dilakukan dengan mengadakan studi kelayakan.
- b. Menyiapkan bahan berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perumusan kebijaksanaan kegiatan studi kelayakan.
- c. Dan atau mengkoordinasikan studi kelayakan yang akan dilakukan terhadap informasi dan data proyek pembangunan sektor perekonomian

dan mengadakan kerjasama penelitian dengan Bappeda, instansi maupun dinas terkait.

Persiapan pengumpulan data yang belum dilakukan dengan baik berdampak pada kurang tepatnya pelaksanaan pengumpulan data. Dari wawancara dengan informan mengungkap selama ini, pengumpulan data yang dilakukan pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan walau sudah dilaksanakan namun kurang tepat waktu dari jadwal dan rencana yang sudah disusun, sehingga hasil-hasil pengumpulan data masih kurang memberi kontribusi terhadap maksud dan tujuan data untuk pengembangan perekonomian daerah. Distribusi jawaban responden terhadap waktu pelaksanaan pendataan, dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Distribusi Jawaban Responden Terhadap Waktu Pelaksanaan Pengumpulan data dan Informasi

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Selalu tepat waktu	4	11	44	15,94
2	Cukup tepat waktu	3	20	60	28,98
3	Kurang tepat waktu	2	34	68	49,27
4	Tidak tepat waktu	1	4	4	5,81
Jumlah			69	176	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Dari tabel 3 di atas menunjukkan dari 69 orang responden, dominan yang memberi jawaban pelaksanaan pendataan pada Biro Bina Perekonomian dan pembangunan kurang tepat waktu, yaitu sejumlah 49,27

% dan hanya 15,94 % responden menanggapi selalu tepat waktu. Gambaran tersebut menunjukkan pelaksanaan pengumpulan data untuk penyusunan rencana pengembangan perekonomian daerah masih perlu lebih ditingkatkan ketepatan waktunya.

Dari hasil penelitian yang diadakan, ditemukan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi pelaksanaan pengumpulan data antara lain: (1) Persiapan pelaksanaan pengumpulan data belum dilakukan dengan baik, yang berakibat pada kurang tepatnya waktu pengumpulan data karena dilakukan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah disusun; (2) Aparat Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan dan aparat pada unit kerja dan instansi terkait kurang mampu menetapkan waktu yang tepat untuk melaksanakan pengumpulan data. Kedua faktor ini mempengaruhi pelaksanaan pengumpulan data pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan yang menyebabkan data yang dikumpulkan dan dikelola untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi dan pengkajian dalam rangka perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah belum dapat diwujudkan dengan baik.

Dalam proses pengumpulan data, ada dua faktor yang harus dilibatkan dan berperan penting untuk mewujudkan efektifitas pengelolaan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan pembangunan, yaitu :

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi dan pengkajian kinerja Perekonomian daerah amat penting untuk menjamin agar data dan informasi yang dikumpulkan akurat dan sesuai kebutuhan. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah :

- a. Komputer guna pengoiahan data
- b. Faks untuk menjamin kecepatan pengiriman data dari instansi/unit kerja lain.
- c. Kendaraan dinas guna menunjang pelaksanaan pendataan.
- d. Dan sarana serta prasarana pendukung, seperti tinta printer, kertas dan lain-lain.

Dari pengamatan diketahui bahwa sarana dan prasarana pengumpulan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan sudah cukup baik kuantitas maupun kualitasnya.

Distribusi jawaban responden pada terhadap sarana dan prasarana pengumpulan data, dapat dilihat pada tabel 4 :



Tabel 4
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Sarana dan Prasarana Pengumpulan data

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Sangat lengkap	4	22	88	31,88
2	Cukup lengkap	3	30	90	43,48
3	Kurang lengkap	2	10	20	14,49
4	Tidak lengkap	1	7	7	10,15
Jumlah			69	205	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Dari tabel 4 tersebut menunjukkan dominan responden memberi tanggapan sarana dan prasarana pengumpulan data informasi yang digunakan saat ini sudah cukup lengkap, yaitu 43,48 persen, dan paling rendah memberi jawaban tidak lengkap yaitu sejumlah 10,14 persen. Gambaran di atas menunjukkan bahwa meskipun sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi sudah lengkap namun masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, karena sarana dan prasarana adalah peralatan yang mutlak dibutuhkan agar dapat menjamin kelancaran pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi guna menyusun kerangka pembangunan perekonomian daerah yang berkesinambungan pada waktu yang akan datang.

Dari wawancara diketahui bahwa sarana dan prasarana sudah tersedia baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya sehingga memudahkan pengelolaan data dan informasi sehingga diharapkan data dan informasi tersebut dapat dijadikan kerangka dasar pelaksanaan koordinasi,

pengkajian, dan konsultasi dengan dinas, instansi dan lembaga di daerah ini untuk mendukung pelaksanaan pengembangan dan pembangunan sektor perekonomian daerah.

Adapun kondisi, sarana dan prasarana pendukung pengelolaan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan dikemukakan pada tabel 5.

Tabel 5
Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan Data dan Informasi
Pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

No	JENIS	KONDISI		JUMLAH (UNIT)
		Rusak (unit)	Baik (unit)	
1	Komputer	4	13	17
2	Printer	7	12	19
3	Fax	3	6	9
4	Kendaraan Dinas	2	4	6
5	Sarana Pendukung	---	--	--

Sumber : Data Sekunder, tahun 2003

Dari tabel lima di atas nampak bahwa sarana dan prasarana pendukung pengelolaan data dan informasi pada Bina Biro Perekonomian dan Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan sudah tersedia dengan baik. Penjajakan yang dilakukan terhadap kondisi sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi menunjukkan meskipun dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai, namun masih perlu dipertimbangkan untuk penambahan jumlahnya karena pada saat-saat tertentu (khususnya memasuki anggaran)

baru, terlihat sarana dan prasarana yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung percepatan dan kecepatan pengelolaan data dan informasi karena sarana berupa komputer lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi ada penundaan pelaksanaan pekerjaan karena semua sarana dan prasarana yang ada terpakai. Khususnya untuk sarana transportasi, sangat dibutuhkan peningkatan jumlahnya karena salah satu faktor yang menyebabkan sehingga pelaksanaan pendataan kurang berjalan dengan optimal adalah kurangnya kendaraan dinas, khususnya apabila harus mengadakan pendataan ke daerah-daerah.

b. Sumber Daya Manusia

Faktor yang juga mempengaruhi pengelolaan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan, adalah Sumber daya manusia. Dalam pengumpulan dan pengolahan data dan Informasi, sumber daya manusia sangat berperan agar data dan informasi yang dikumpulkan dan dikelola dapat berhasil mewujudkan suatu kerangka kebijakan yang jelas bagi peningkatan pembangunan sektor perekonomian dan administrasi pembangunan di Propinsi Sulawesi Selatan

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan adalah kualitasnya. Kualitas

sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan informasi dapat dilihat dari pendidikan formal, pengalaman, dan keterampilan.

Dari penelitian, diketahui bahwa SDM aparat pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari tingkat pendidikan formalnya sebagian adalah SLTA yaitu sejumlah 31 orang, SLTP 8 orang, Sarjana (S1) 24 orang, dan Pasca Sarjana 6 orang

Adapun keadaan pendidikan formal aparat Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Pendidikan Formal Aparat
Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Propinsi Sulawesi Selatan

No	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	SLTP	8 orang	11,59
2	SLTA	30 orang	43,48
3	Sarjana	24 orang	34,78
4	Sarjana (S2)	6 orang	8,69
	Jumlah	69 orang	100,00

Sumber : Data Sekunder Tahun 2003

Pendidikan formal sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pengumpulan data dan informasi karena sumber daya manusia adalah merupakan motor penggerak dari semua gerak dan kegiatan operasional pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi yang dilaksanakan pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan.

Dari data di atas menunjukkan sumber daya manusia pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa pendidikan formal sumber daya manusia masih kurang, karena sebagian besar pendidikan formalnya hanya SLTA. Latar pendidikan formal sumber daya manusia tersebut cenderung masih kurang cukup dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi perekonomian dan pembangunan karena dengan latar belakang pendidikan yang sederajat SLTA tersebut, wawasan, cara pikir dan cara pandang serta pengetahuannya terhadap pendataan dan pengolahan data dan informasi perekonomian dan pembangunan masih kurang. Dengan kata lain, apabila dilihat dari sektor pendidikan formal aparat, kemampuan dalam pengelolaan data dan informasi cenderung masih kurang.

Rendahnya pendidikan formal sumber daya manusia dalam pengumpulan data yang hanya setingkat SLTA dianggap kurang mampu melaksanakan tugas-tugas pengumpulan data secara optimal sehingga kurang memberi kontribusi terhadap perwujudan efektivitas informasi yang akurat dan valid guna pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan pengkajian pelaksanaan pembangunan sektor perekonomian di daerah ini. Dari wawancara diketahui bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendataan pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan, pendidikan formal sumber daya manusia sangat diperlukan



karena kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi memerlukan wawasan, pengetahuan, dan tindakan-tindakan yang tepat. Hal ini menyebabkan faktor pendidikan formal sumber daya manusia dianggap berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaannya, karena dalam pendataan dituntut sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana dan apa kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pengumpulan data.

Dari pengamatan memperlihatkan latar belakang pendidikan formal aparat masih kurang mendukung pelaksanaan pendataan pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan yang dapat dilihat selain proses penanganan data yang kurang akurat, juga dalam pengolahan data masih kurang cepat dan sangat lamban merespon kebutuhan-kebutuhan informasi pembangunan bidang perekonomian di daerah ini.

Dari pengamatan dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal sumber daya manusia pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan masih kurang mendukung pendataan, karena belum mampu memberi kontribusi terhadap upaya menghasilkan suatu data yang akurat dan valid, khususnya dalam hal :

- (1) Kecepatan proses pengumpulan data masih kurang dapat diwujudkan sehingga ada informasi yang seharusnya sudah dikumpulkan belum dapat diselesaikan dengan baik sesuai jadwal yang sudah ditetapkan;
- (2) Pelayanan terhadap distribusi data tidak dapat dilakukan cepat dan akurat,

bahkan ada sejumlah data dan informasi pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tetap diproses sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan untuk penyusunan kerangka perencanaan pembangunan.,

Wawancara dengan beberapa orang staf mempertegas hal tersebut di atas, karena pendidikan formal sumber daya manusia yang sebagian besar SLTA kurang memberi ide, cara bertindak, dan cara berpikir yang tepat dan cepat terhadap pengumpulan data sehingga mencapai sasaran yakni meningkatkan efektivitas informasi guna pelaksanaan koordinasi, pengkajian dan konsultasi pembangunan perekonomian daerah ini.

Dari peninjauan menunjukkan kelemahan pokok sehubungan dengan kemampuan aparat dilihat dari pendidikan formalnya adalah penempatan belum dilakukan dengan tepat dalam arti penempatan SDM aparat sesuai dengan pendidikan formalnya. Hal ini tergambar jelas dari distribusi jawaban responden pada tabel 7.

Tabel 7
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Penempatan SDM Aparat Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	4	8	32	11,59
2	Cukup sesuai	3	13	39	18,84
3	Kurang sesuai	2	42	84	60,87
4	Tidak sesuai	1	6	6	8,70
Jumlah			69	161	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Dari tabel 7 tersebut menunjukkan dominan responden memberi jawaban penempatan aparat pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan masih kurang sesuai, yaitu 60,87 persen, dan paling rendah memberi jawaban tidak sesuai sejumlah 8,79 persen. Gambaran ini menunjukkan penempatan SDM aparat belum dilakukan sesuai latar belakang pendidikan SDM aparat. Penelitian yang dilakukan menunjukkan penempatan aparat pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan belum mendapat perhatian yang baik dari pimpinan sehingga ada aparat yang memiliki potensi di bidang tertentu sesuai latar belakang pendidikannya namun karena ditempatkan di bidang lain, mengakibatkan aparat tidak dapat mengimplementasikan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan latar belakang pendidikan formalnya, seperti sarjana Sosial ditunjuk menjadi bendaharawan. Kondisi tersebut mengakibatkan pendidikan formal aparat masih kurang mendukung peningkatan kemampuan aparat dalam pengelolaan data dan informasi khususnya terhadap pelaksanaan pengumpulan data.

Kemampuan aparat juga dapat dilihat dari keterampilannya dalam pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi sehingga dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat dan valid untuk dijadikan sarana koordinasi, pengkajian, dan konsultasi terhadap pengembangan pembangunan sektor perekonomian di daerah ini. Keterampilan SDM aparat Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Wilayah Provinsi

Sulawesi Selatan dapat diketahui dari penguasannya terhadap bidang tugasnya, pemahamannya terhadap proses pengelolaan data dan informasi, serta kecepatan dan ketepatan pelaksanaan pendataan maupun pengelolaan data dan informasi.

Penjajakan yang dilakukan memperlihatkan keterampilan aparat SDM dalam pendataan serta pengelolaan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini tergambar dari distribusi jawaban responden pada tabel berikut :

Tabel 8
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Keterampilan SDM Aparat Pada Biro Bina Perekonomian
dan Pembangunan

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Sangat terampil	4	21	84	30,43
2	Cukup terampil	3	19	57	27,54
3	Kurang terampil	2	27	54	39,13
4	Tidak terampil	1	2	2	2,90
Jumlah			69	197	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Dari tabel 8 di atas menunjukkan bahwa dominan responden memberi jawaban SDM aparat Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan masih kurang terampil, yaitu sejumlah 39,13 persen, dan paling rendah memberi jawaban tidak terampil, yaitu sejumlah 2,90 persen. Jawaban responden di atas menunjukkan bahwa keterampilan SDM aparat perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data dan informasi. Dari penelitian

diketahui bahwa keterampilan aparat cenderung masih rendah dilihat dari sejumlah faktor, yaitu : (a) realisasi dari rencana pada pelaksanaan pendataan belum dapat diwujudkan tepat waktu; (b) Masih terdapat penundaan pekerjaan yang tidak perlu, karena aparat kurang memahami proses dan mekanisme kerja yang sesungguhnya; (c) dalam proses pengelolaan data dan informasi masih dijumpai kekeliruan yang mengakibatkan proses pelaksanaan harus di ulang. Ketiga faktor tersebut mengindikasikan bahwa keterampilan aparat dalam proses pendataan masih kurang baik dan perlu lebih ditingkatkan lagi.

Untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam pengolahan data dan informasi, dibutuhkan pelaksanaan diklat karena dengan mengikuti pegawai dalam diklat dapat menambah wawasan dan kemampuan dalam pelaksanaan tugasnya. Dari penelitian yang diadakan, pelaksanaan diklat pegawai sudah berjalan dengan baik, khususnya pelaksanaan diklat fungsional karena dari 8 orang yang terlibat dalam pengolahan data, sebanyak 6 orang sudah mengikuti diklat fungsional, seperti ADUM sebanyak 5 orang dan Spama sebanyak 1 orang.

kendala yang dijumpai adalah pelaksanaan diklat teknis sehubungan dengan pengolahan data dan informasi belum dilaksanakan dengan baik, karena baru 1 orang yang telah mengikuti diklat teknis berupa kursus komputer. Hal ini mempengaruhi kemampuan dan keterampilan pegawai dalam pengolahan data dan informasi pembangunan. Untuk itu sangat

dibutuhkan penyelenggaraan diklat teknis agar dapat meningkatkan keterampilan pegawai dalam pengolahan data dan informasi.

2. Analisa dan Penilaian

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, maka menindaklanjuti data-data tersebut untuk dijadikan bahan koordinasi, konsultasi dan pengkajian kinerja sektor pembangunan perekonomian, dilakukan penganalisaan dan penilaian terhadap data. Analisa dan penilaian bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan menunjukkan pelaksanaan analisa dan penilaian data dan informasi meskipun sudah dilakukan namun perlu lebih dioptimalkan. Distribusi jawaban responden terhadap hal ini, dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Analisa dan Penilaian Data Informasi Pada Biro Bina
Perekonomian dan Pembangunan

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Selalu dilakukan	4	25	100	36,23
2	Cukup dilakukan	3	14	42	20,30
3	Kurang dilakukan	2	23	69	33,33
4	Tidak dilakukan	1	7	7	10,14
Jumlah			69	218	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Data pada tabel 9 di atas menunjukkan bahwa kegiatan analisa dan penilaian terhadap data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan, dominan responden menjawab selalu dilakukan yaitu 36,23 persen, namun responden yang memberi jawaban kurang dilakukan juga cukup besar jumlahnya yaitu 33,33 persen. Data tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan analisa dan penilaian terhadap data dan informasi menyangkut kondisi dan keadaan perkembangan perekonomian daerah belum dilaksanakan secara optimal.

Penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa kegiatan analisis dan penilaian terhadap data dan informasi yang sudah dilakukan pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan belum dilaksanakan secara optimal, karena data dan informasi yang sudah dikumpulkan dari unit kerja, instansi dan lembaga mengenai pembangunan perekonomian di daerah ini dianggap sudah valid dan telah menggambarkan kondisi sebenarnya. Hal ini mengakibatkan sebagian aparat merasa tidak perlu menganalisis dan menilai keabsahan dari data dan informasi tersebut, sehingga ada data bidang pembangunan perekonomian yang kurang sesuai dengan kondisi di daerah ini.

Dari wawancara menunjukkan meskipun analisis dan penilaian sudah dilakukan, namun belum menjamin bahwa data dan informasi sudah valid dan dapat dijadikan sebagai bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan pengkajian sektor perekonomian daerah, karena : (1) Data dan informasi



yang dikumpulkan melalui pendataan belum dapat dijamin keakuratan dan kevalidannya sebab dalam proses pengumpulan data belum dilakukan dengan baik dan optimal; (2) Sebagian aparat yang terlibat dalam proses analisis dan penilaian data kurang cemat sehingga data dan informasi khususnya yang diperoleh dari laporan tertulis terlihat kurang valid namun tetap dijadikan bahan pertimbangan bagi penyusunan rencana untuk pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan pengkajian mengenai kemajuan, hambatan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi di daerah ini; (3) masih dilibatkan aparat yang kurang berpengalaman sehingga tidak memahami proses analisis dan penilaian data dan informasi. Ketiga fakta di atas mengindikasikan bahwa analisa dan penilaian terhadap data dan informasi belum dilaksanakan dengan optimal agar data dan informasi yang dijadikan rencana dapat menjadi implementasi dan panduan bagi pelaksanaan pembangunan bidang perekonomian di daerah ini.

Dalam analisa dan penilaian, tindakan yang dilakukan adalah pencatatan dan penilaian. Hasil penelitian mengenai hal ini dikemukakan sebagai berikut :

a. Pencatatan

Pelaksanaan pencatatan terhadap data sudah dilakukan dengan baik, karena semua data dan informasi yang dikumpulkan sudah dicatat sesuai

dengan kondisi, peruntukan dan jenis data yang bersangkutan. Distribusi jawaban responden terhadap pencatatan, dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Pencatatan Data Dan Informasi Pada Biro Bina Perekonomian
dan Pembangunan

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Selalu dilakukan	4	61	244	88,41
2	Cukup dilakukan	3	6	18	8,70
3	Kurang dilakukan	2	2	4	2,89
4	Tidak dilakukan	1	--	--	--
Jumlah			69	266	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Dari tabel 10 di atas menunjukkan bahwa dominan responden memberi jawaban pencatatan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan selalu dilakukan, yaitu sejumlah 88,41 persen dan paling rendah responden memberi jawaban kurang dilakukan yaitu sejumlah 2,89 persen.

Pencatatan penting dilakukan karena dengan melaksanakan pencatatan akan diketahui apakah data yang dibutuhkan sudah terpenuhi atau tidak agar langkah untuk segera merevisi data dapat dilakukan jika ternyata data-data yang sudah dikumpulkan belum dapat dipenuhi.

Dari wawancara diketahui bahwa pencatatan dari unit-unit kerja dan instansi terkait terhadap pelaksanaan pembangunan adalah kegiatan penting untuk memperoleh data dan informasi yang dijadikan sebagai acuan bagi

pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan pengkajian pembangunan perekonomian. Kegiatan pencatatan meliputi seluruh data yang sudah dikumpulkan sesuai jenis dan peruntukannya baik dalam bentuk angka maupun dalam bentuk keterangan kegiatan setiap instansi dan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah Propinsi Sulawesi Selatan menyangkut pembangunan sektor perekonomian daerah.

Dari penelitian diketahui bahwa pencatatan terhadap data yang dikumpulkan dipilah dan diklasifikasikan kedalam :

a. Data APBN

Pencatatan terhadap APBN dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah pembiayaan terhadap proyek pembangunan sektor perekonomian yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan. Pencatatan terhadap APBN dilakukan pertriwulan dengan mempertimbangkan :

1. Jumlah dana proyek pembangunan sektor perekonomian yang digunakan dari APBN terhadap seluruh jenis proyek yang dilaksanakan di Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Kemajuan pemanfaatan dana proyek pembangunan sektor perekonomian dari APBN yang sudah terpakai.
3. Pencatatan terhadap kemajuan dan penyelenggaraan proyek pembangunan sektor perekonomian yang didanai dari APBN.

Dari penelitian memperlihatkan bahwa meskipun pencatatan terhadap APBN sudah dilakukan, namun masih terdapat kekurangan yang

menyebabkan pencatatan belum optimal mendukung peningkatan pembangunan sektor perekonomian daerah melalui koordinasi, konsultasi, dan pengkajian kinerja yang dilaksanakan. Hal ini karena pencatatan kelengkapan data masih mengalami kekeliruan khususnya terhadap proporsi jumlah dan peruntukannya.

Mengenai adanya kekeliruan pencatatan data APBN untuk mendukung kegiatan sektor pembangunan perekonomian daerah, distribusi jawaban responden dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Kekeliruan Pencatatan Data Dan Informasi Penggunaan Dana APBN Pada
Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Selalu	4	60	72	86,95
2	Cukup	3	6	18	8,71
3	Kadang-kadang	2	3	3	4,34
4	Tidak pernah	1	--	--	--
Jumlah			69	93	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Dari jawaban responden yang dihimpun dari angket, memperlihatkan bahwa terhadap pencatatan APBN kelemahan-kelemahan yang masih dijumpai adalah :

- 1) Pencatatan sering tidak sesuai dengan angka-angka normatif yang disodorkan dari proyek melalui pendataan pada unit kerja.
- 2) Pencatatan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

3) Aparat kurang memahami proses dan prosedur pencatatan sehingga ada data dan informasi yang seharusnya dimasukkan ke dalam klasifikasi tertentu tidak cocok dengan jenis data yang seharusnya.

b. Data APBD

Selain pencatatan terhadap APBN juga dilakukan terhadap APBD. Pencatatan terhadap APBD adalah penguangan dari APBN yang sudah dicatat sebelumnya sehingga pencatatan terhadap APBD harus mencerminkan dana APBD ditambah dengan dana yang diambil dari keuangan daerah.

Terhadap pencatatan APBD, faktor-faktor diperhatikan adalah pencatatan terhadap :

a. Sub Sektor, yang berupa :

- 1) Pertanian tanam pangan
- 2) Sub Sektor pertambangan dan energi
- 3) Sub Sektor Kebudayaan dan Pariwisata
- 4) Sub Sektor Kesehatan
- 5) Sub Sektor Peternakan
- 6) Sub Sektor Perikanan
- 7) Sub Sektor Perindustrian dan Perdagangan

Pencatatan terhadap sub-sub sektor tersebut di atas terlihat kurang baik sebab pencatatan belum sesuai dengan sub sektor yang sudah ditetapkan khususnya terhadap pendanaannya sehingga sering dilakukan

revisi ulang. Contohnya dana yang diperuntukkan untuk sub sektor peternakan dikondisikan ke dalam sub sektor pertanian sehingga tidak dapat menjadi bahan koordinasi, konsultasi dan pengkajian kinerja perekonomian di daerah Sulawesi Selatan..

Pencatatan terhadap APBD dan APBN adalah penggambaran mengenai data pembiayaan proyek sektor pembangunan perekonomian yang dilaksanakan saat ini di berbagai instansi terkait terhadap data operasional pelaksanaan proyek pembangunan yang sudah ada dan akan diadakan kemudian dengan pembiayaan dari APBN maupun APBD.

Dari penelitian menunjukkan kelemahan dalam pencatatan data dan informasi sektor perekonomian pada Bina Biro Perekonomian dan Pembangunan adalah keterlambatan pencatatan. Distribusi jawaban responden mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Keterlambatan Pencatatan Data Dan Informasi Pada
Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Sering	4	8	32	11,59
2	Cukup	3	29	87	42,02
3	Kadang-kadang	2	12	32	17,39
4	Tidak pernah	1	20	24	29,00
Jumlah			69	175	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Dari tabel 12 di atas menunjukkan dominan responden memberi jawaban cukup terjadi keterlambatan dalam proses pencatatan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan pembangunan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sejumlah 42,02 persen, dan paling rendah memberi jawaban sering terjadi keterlambatan yaitu sejumlah 11,59 persen. Gambaran tersebut menunjukkan pencatatan terhadap data dan informasi belum dilaksanakan tepat waktu dan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni selambat-lambatnya bulan januari tahun berjalan, sehingga data dan informasi hasil pencatatan dapat dijadikan persiapan penyelenggaraan koordinasi dan pengkajian dalam rangka merumuskan kebijakan pengembangan perekonomian daerah.

Dari wawancara diketahui bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadi keterlambatan dalam proses pencatatan, yaitu:

1. Hasil analisis dan penilaian terhadap data dan informasi terlambat dilakukan, yang berakibat keterlambatan dalam proses pencatatan.
2. Pengumpulan data belum dilaksanakan dengan akurat menyebabkan setelah proses pencatatan dilakukan, data tersebut tidak sesuai dengan peruntukan ataupun obyeknya sehingga harus dikembalikan ke unit analisis data untuk diadakan analisis ulang terhadap kebenarannya.
3. Kemampuan dan SDM aparat yang kurang baik menyebabkan proses pencatatan berjalan lambat dan tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Faktor tersebut di atas adalah faktor yang menyebabkan sehingga proses pencatatan berjalan lambat dan tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu seperti yang sudah direncanakan sebelumnya.

b. Penilaian

Proses selanjutnya adalah penilaian terhadap pencatatan yang sudah dilakukan. Penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah penetapan target penggunaan dana proyek baik dari APBD maupun APBN sudah sesuai dengan sebenarnya. Penilaian juga dilakukan melalui pengkajian kemajuan penggunaan dana, dan pengkajian kemajuan lembaga-lembaga perekonomian daerah, sarana dan prasarana perekonomian daerah dan menganalisis kebijakan implementatif dalam rangka memfasilitasi dan pembinaan peningkatan produksi dan distribusi serta optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah yang didanai dari APBN maupun APBD.

Penelitian yang dilakukan menunjukkan penilaian terhadap data dan informasi perekonomian sudah dilakukan. Distribusi jawaban responden terhadap hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Penilaian Data Dan Informasi Pada Biro Bina
Perekonomian dan Pembangunan

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Selalu dilakukan	4	56	224	81,16
2	Cukup dilakukan	3	11	33	15,94
3	Kurang dilakukan	2	2	4	2,90
4	Tidak dilakukan	1	--	--	--
Jumlah			69	261	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Dari tabel 13 di atas menunjukkan bahwa dominan responden memberi jawaban selalu dilakukan penilaian data dan informasi yaitu sejumlah 81,16 persen, paling rendah sejumlah 2,90 persen menanggapi kurang dilakukan. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa penilaian data dan informasi sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta mekanisme kerja pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan.

Penilaian data dan informasi didasarkan atas target penggunaan dana dan biaya yang sudah ditetapkan. Jika sesuai maka pencatatan disetujui untuk dijadikan dasar penyusunan laporan dan jika tidak sesuai, dilakukan revisi ulang untuk menyesuaikan dengan data yang seharusnya.

3. Pelaporan

Pelaporan terhadap kemajuan pelaksanaan proyek perekonomian, kemajuan penggunaan lembaga perekonomian, dan kemajuan terhadap produksi dan distribusi serta pembinaan sektor perekonomian yang sudah dilakukan sebelumnya, maupun penggunaan dana penting dicatat dengan baik, karena akan menjadi pertimbangan bagi penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan pada tahap selanjutnya, khususnya untuk menetapkan prioritas dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana pembangunan sektor perekonomian yang sudah dimiliki, pelaporan terhadap data berupa proyek-proyek pembangunan perekonomian pada unit kerja dan instansi terkait. Pelaporan penting untuk dijadikan dasar persiapan pelaksanaan koordinasi, pengkajian maupun konsultasi bagi penyusunan rencana-rencana pembangunan sektor perekonomian untuk tahun anggaran selanjutnya.

a. Meringkas

Peringkasan data dan informasi proyek-proyek pembangunan sektor ekonomi, kemajuan distribusi dan produksi, serta kemajuan-kemajuan lembaga dan sarana perekonomian daerah baik yang sedang berjalan dan akan dilakukan, bertujuan agar data dan informasi dapat lebih jelas, efektif dan efisien sehingga memudahkan penganalisaan dan menjadi pertimbangan bagi aparat untuk menyusun rencana yang lebih baik. Hasil peringkasan data

dan informasi pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Menurut Sektor
Tahun 2000 sampai dengan 2002

NO	SEKTOR	2000	2001	2002
1	Pertanian	2,49	0,10	1,12
2	Pertambangan dan penggalian	19,05	16,13	1,57
3	Industri dan pengolahan	3,41	8,06	3,33
4	Listrik, gas, dan air bersih	3,69	1,63	14,10
5	Bangunan	0,08	-1,66	9,07
6	Perdagangan, restoran dan hotel	2,06	4,97	12,68
7	Angkutan dan komunikasi	5,13	7,45	11,75
8	Keuangan, persewaan dan jasa per.	-2,31	-0,37	-1,32
9	Jasa-jasa	0,71	15,65	3,74
	Sulsel	2,83	4,89	4,97

Sumber : data Sekunder Tahun 2003

Berdasarkan ringkasan kondisi perekonomian Sulawesi Selatan pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2000 ekonomi Sulawesi Selatan bertumbuh sebesar 2,83 persen kemudian tahun 2001 tumbuh sebesar 4,89 persen dan tahun 2002 sebesar 4,97 %. Relatif membaiknya kondisi perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2002 didorong oleh pertumbuhan positif sektor-sektor ekonomi yang memiliki andil cukup besar bagi perekonomian yakni sektor pertanian dan sektor perdagangan, restoran dan hotel.

Berdasarkan data di atas, maka diketahui bahwa kegiatan meringkas data dan informasi pembangunan sektor perekonomian daerah pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat sudah dilakukan. Distribusi jawaban responden terhadap hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Meringkas Data Dan Informasi Pada Biro Bina
Perekonomian dan Pembangunan

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Selalu dilakukan	4	56	240	81,16
2	Cukup dilakukan	3	11	33	15,94
3	Kurang dilakukan	2	2	4	2,90
4	Tidak dilakukan	1	--	--	--
Jumlah			69	277	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Dari tabel 15 di atas menunjukkan bahwa dominan responden memberi jawaban kegiatan meringkas sudah dilakukan yaitu sejumlah 81,16 persen dan paling rendah menjawab kurang dilakukan sejumlah 2,90 %. Berdasarkan pengamatan terlihat bahwa meskipun peringkasan sudah dilakukan, masih terdapat kelemahan sehingga data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dijadikan alat bagi kegiatan koordinasi, pengkajian dan konsultasi terhadap pembangunan sektor perekonomian daerah.

Sehubungan dengan pelaksanaan peringkasan data dan informasi pembangunan sektor perekonomian pada Biro Bina Perekonomian dan

Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan, dilakukan melalui pertemuan langsung dengan aparat Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan dengan aparat pada dinas dan instansi terkait. Pada pertemuan tersebut setiap instansi diwakili oleh satu atau dua orang yang bertanggung jawab untuk daerah kerjanya masing-masing dengan menginformasikan semua data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan untuk pelaksanaan pengendalian pembangunan. Dari pertemuan tersebut, kemudian aparat Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan menyusun ringkasan informasi dan data proyek pembangunan pengembangan yang disodorkan dengan mengkonfirmasi kebenaran-kebenaran dari data tersebut.

Peringkasan data yang dilakukan dapat juga hanya mendistribusikan data dan informasi dari instansi terkait dan kemudian menjadi acuan untuk mengadakan peringkasan apabila dianggap data dan informasi yang diberikan sudah benar-benar akurat dan valid.

Dari kenyataan terlihat bahwa proses peringkasan data yang dilakukan masih kurang efektif karena peringkasan tidak menggambarkan keseluruhan angka-angka (biaya, sarana, kelembagaan maupun produksi) yang dituangkan pada setiap jenis kegiatan di sektor perekonomian. Keadaan ini mempengaruhi proses penganalisaan karena aparat dalam menyusun rencana selalu berpatokan pada kegiatan peringkasan yang kemudian dijadikan laporan.

Adanya kelemahan peringkasan informasi dan data proyek pembangunan menyebabkan hasil peringkasan data dan informasi belum sepenuhnya menjadi pedoman bagi pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan pengkajian pembangunan sektor perekonomian. Untuk itu sebaiknya diupayakan pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan peringkasan dengan baik, sehingga mewujudkan efektivitas dan efisien pengelolaan informasi dan penyusunan laporan.

Mencermati jawaban responden terhadap kegiatan peringkasan data dan informasi pembangunan sektor perekonomian, memperlihatkan bahwa peringkasan belum dapat menjadi pedoman bagi pembangunan sektor perekonomian. Hal ini disebabkan belum semua informasi yang dikumpulkan terhadap proyek pembangunan dapat diringkas dengan tepat dan dapat dijadikan pedoman penyusunan laporan yang baik dan menggambarkan keadaan pelaksanaan proyek pembangunan di daerah ini.

Wawancara dengan informan memperkuat tanggapan responden, karena hasil peringkasan data dan informasi pembangunan sektor perekonomian belum mampu dijadikan pedoman bagi pengembangan pembangunan sektor perekonomian daerah. Keadaan ini karena adanya kontradiksi yang cukup besar antara kenyataan di lapangan dengan data yang diringkas sehingga perlu penganalisaan yang lebih akurat.

b. Menyusun

Proses selanjutnya adalah melakukan penyusunan terhadap data dan informasi pembangunan sektor perekonomian daerah yang diperoleh dari instansi dan unit kerja terkait.

Penyusunan data dan informasi yang baik membutuhkan keterlibatan aparat pada unit kerja dan instansi terkait, karena keterlibatan aparat pada unit kerja dan instansi terkait secara langsung, dapat diperoleh gambaran nyata dan jelas mengenai keadaan data dan informasi perekonomian daerah baik menyangkut jenis maupun potensi yang ada saat ini

Temuan dari penelitian memperlihatkan keterlibatan aparat di unit kerja instansi terkait dalam menyusun data dan informasi pembangunan perekonomian cenderung masih kurang. Kurangnya partisipasi dan keterlibatan aparat pada Unit kerja dan instansi terkait karena jadwal penyusunan data pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan tidak jelas waktunya, sehingga aparat dari unit kerja dan dinas serta instansi terkait hanya mengirimkan laporan untuk melengkapi persyaratan bagi pengumpulan data yang harus dilakukan. Distribusi jawaban responden terhadap hal ini dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Keterlibatan Unit kerja/Instansi dan Lembaga Terkait Dalam
Penyusunan Data dan Informasi

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Selalu terlibat	4	20	88	28,98
2	Cukup terlibat	3	13	39	18,85
3	Kurang terlibat	2	35	70	50,72
4	Tidak terlibat	1	1	1	1,45
Jumlah			69	198	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Tabel 16 di atas menunjukkan dominan responden memberi jawaban kurang terlibat yaitu sejumlah 50,72 persen, dan paling rendah memberi jawaban tidak terlibat sejumlah 1,45 persen. Kondisi di atas menggambarkan bahwa keterlibatan aparat terkait dalam proses penyusunan data dan informasi masih kurang atau kurang dilibatkan.

Jawaban responden dari angket tersebut mengindikasikan partisipasi aparat unit kerja/instansi dan lembaga terkait dalam penyusunan data dan informasi pembangunan perekonomian masih kurang baik dalam bentuk kehadiran pada rapat koordinasi yang diselenggarakan maupun dalam bentuk pemberian data dan informasi mengenai potensi ekonomi dan pelaksanaan pembangunan perekonomian.

Wawancara dengan informan memperjelas tanggapan responden di atas karena partisipasi aparat dalam penyusunan data dan informasi pembangunan sektor perekonomian pada Biro Bina Perekonomian dan

Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan masih kurang dilaksanakan, khususnya dalam mendistribusikan data dan informasi. Keadaan ini berdampak pada kurang optimalnya penyusunan data dan informasi menyangkut kemajuan dan pembangunan sektor perekonomian, karena penyusunan data dan informasi dari instansi dan unit kerja terkait tidak dapat diterima secara akurat dan valid serta tepat waktu.

Partisipasi aparat terhadap penyusunan data, dan informasi menyangkut pembangunan sektor perekonomian daerah menimbulkan dampak terhadap : (a) Penyusunan data dan informasi kondisi, keadaan perekonomian dan kegiatan pembangunan perekonomian dalam bentuk rencana untuk pedoman bagi rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan pengkajian yang diselenggarakan tidak menggambarkan keadaan dan kondisi sebenarnya karena data dan informasi yang disusun tidak didukung oleh data dan informasi yang valid dan akurat; (b) Aparat pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan, kurang mampu mengembangkan penyusunan data dan informasi sektor perekonomian daerah untuk menyusun rencana sesuai kebutuhan bagi pelaksanaan koordinasi, pengkajian dan konsultasi pembangunan perekonomian daerah karena masukan lisan mengenai pelaksanaan kondisi perekonomian daerah dan kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan untuk mengembangkan potensi daerah, tidak dapat dilakukan; (c) rencana yang dihasilkan dari rapat koordinasi kurang disesuaikan dengan kebutuhan

tiap-tiap jenis pelaksanaan proyek pembangunan sektor perekonomian maupun langkah dan strategi peningkatan pembangunan perekonomian daerah.

Untuk menyusun laporan dengan menggunakan data dan informasi yang sudah dikumpulkan dan diringkas, langkah pertama yang harus dilakukan oleh aparat Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan adalah mempertimbangkan data yang sudah diringkas dan disusun sesuai jenis dan peruntukannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyusunan laporan data dan informasi perkembangan perekonomian daerah walaupun sudah dilakukan, namun masih harus dioptimalkan lagi. Hal ini tercermin dari jawaban responden pada tabel 17.

Tabel 17
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Penyusunan Laporan Pada Biro Bina Perekonomian
Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Selalu dilakukan	4	47	188	68,11
2	Cukup dilakukan	3	12	36	17,39
3	Kurang dilakukan	2	10	20	14,50
4	Tidak dilakukan	1	--	--	--
Jumlah			69	244	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Dari tabel 17 di atas menunjukkan meskipun dominan responden memberi jawaban selalu dilakukan, yaitu sejumlah 68,11 persen namun

masih terdapat responden memberi tanggapan kurang dilakukan sejumlah 14,50 persen. Jawaban responden tersebut mengindikasikan bahwa walaupun penyusunan laporan data dan informasi perekonomian daerah belum optimal, karena masih ada data dan informasi pembangunan sektor perekonomian yang belum di data dan diringkas kemudian dimasukkan kedalam penyusunan laporan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa karena tindakan pelaporan yang seharusnya dilakukan secara kontinyu untuk mengetahui perkembangan penggunaan dana untuk proyek dan kemajuan proyek perekonomian daerah itu sendiri belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sesuai tugas pokok Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan dalam koordinasi, konsultasi dan pengkajian kinerja perekonomian daerah, agar dapat menyusun suatu kebijakan pengembangan perekonomian daerah seharusnya setiap tiga bulan sekali diadakan pelaporan ulang untuk persiapan pelaksanaan koordinasi proyek yang sementara dan akan dilaksanakan. Dengan demikian, secara rutin pelaporan dilakukan empat kali dalam setahun. Kenyataannya pelaksanaan pelaporan Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan untuk mengetahui potensi data dan informasi pengembangan pembangunan perekonomian daerah belum sesuai dengan kebutuhan. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan pelaporan yang seharusnya dilakukan yakni 4 (empat) kali setahun, nampak bahwa selama kurun waktu 3 tahun terakhir

pelaksanaan pelaporan masih kurang jumlahnya, karena rata-rata dalam setahun hanya dilakukan pendataan sebanyak 2 kali.

Wawancara dengan informan diketahui bahwa kurang baiknya penyusunan pelaporan disebabkan karena: (1) Penentuan jadwal pelaporan kurang jelas dan tidak ditetapkan lebih awal sehingga pada waktu pendataan aparat yang diberi tugas, mengerjakan tugas lain yang lebih penting sehingga berhalangan untuk mengikuti pendataan; (2) Pelaporan terkesan kurang diminati untuk dilaksanakan oleh pegawai, karena dianggap kurang penting sebab data dan informasi yang dibutuhkan sudah tersedia dalam bentuk laporan dari unit kerja lainnya.

Wawancara dengan informan diketahui bahwa pelaporan terhadap perkembangan perekonomian daerah khususnya yang dilakukan Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan cenderung masih kurang baik dan kurang mendapat perhatian aparat, sehingga laporan yang terisi data dan informasi dari instansi/lembaga di daerah kurang ditindaklanjuti apakah sesuai keadaan di daerah atau tidak. Hal ini juga berdampak pada tidak diketahuinya secara pasti bagaimana kesiapan unsur-unsur perekonomian daerah dana untuk mendukung upaya pembangunan dan perkembangan perekonomian daerah.

Dari penelitian juga diketahui bahwa waktu pengumpulan data terhadap informasi dan data proyek pembangunan pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan

belum dilaksanakan sesuai rencana. Penelitian yang dilakukan, tergambar bahwa kurang tepatnya waktu pelaporan perkembangan dan pembangunan perekonomian daerah disebabkan karena tahapan pelaksanaan koordinasi tidak dilaksanakan secara konsisten, sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan pengkajian kinerja perekonomian daerah. Kurang tepatnya waktu pelaksanaan pelaporan berakibat kontribusinya terhadap perkembangan perekonomian daerah di Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang.

Tanggapan responden mengenai hal tersebut dapat dilihat pada 18.

Tabel 18
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Waktu Penyampaian Laporan Pada Biro Bina Perekonomian
Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Selalu tepat waktu	4	17	68	24,64
2	Cukup tepat waktu	3	13	39	18,84
3	Kurang tepat waktu	2	34	68	49,27
4	Tidak tepat waktu	1	5	5	7,25
Jumlah			69	180	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Tabel 18 tersebut di atas memperlihatkan bahwa pelaporan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomi dan Pembangunan Sekreariat Provinsi Sulawesi Selatan, dominan responden memberi tanggapan kurang tepat waktu, yaitu sejumlah 49,27 %, dan hanya 24,64 persen memberi tanggapan selalu tepat waktu.

Dari jawaban responden mengindikasikan bahwa pelaporan pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan dengan instansi/lembaga/dinas terkait di daerah belum mampu memberi sumbangan dan upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah ini secara optimal, karena kontribusi pelaporan perkembangan pembangunan daerah untuk pengambilan kebijakan masih kurang baik.

Untuk memperoleh hasil laporan yang dapat dijadikan pedoman bagi penentuan kebijakan pemerintah di sektor pembangunan perekonomian, seharusnya keterlibatan seluruh unsur aparat di daerah perlu dipertimbangkan. Mengenai keterlibatan aparat di daerah dalam penyusunan laporan perkembangan perekonomian dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Keterlibatan Unit kerja/Instansi dan Lembaga Terkait Dalam
Penyusunan Laporan

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Selalu terlibat	4	11	44	15,94
2	Cukup terlibat	3	16	48	23,19
3	Kurang terlibat	2	34	68	35,42
4	Tidak terlibat	1	8	8	1,45
Jumlah			69	168	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Tabel 19 tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan unit kerja/instansi dan lembaga terkait dalam penyusunan laporan masih kurang dilibatkan

karena dominan responden memberi jawaban kurang terlibat yaitu sejumlah 35,42 persen, dan hanya 15,94 persen memberi tanggapan selalu terlibat. Distribusi jawaban responden tersebut mengindikasikan pelaksanaan pelaporan yang dilakukan Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan bersama instansi/dinas/lembaga terkait di daerah belum memperhatikan keterlibatan aparat pemerintah daerah.

Wawancara dengan informan diketahui bahwa dalam pengumpulan data terhadap data dan informasi perkembangan pembangunan perekonomian, keterlibatan aparat pemerintah di daerah masih kurang sehingga terlihat setiap kali diadakan koordinasi, dan pengkajian, kehadiran aparat pemerintah di daerah tidak sesuai jumlah yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena selain informasi dan jadwal pelaksanaan yang masih kurang aktual, aparat pemerintah di daerah, juga kurang memperhatikan untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data yang dilaksanakan, padahal masukan dan pandangan aparat pemerintah sangat dibutuhkan karena bagaimanapun aparat pemerintah di daerah lebih memahami dan mengetahui keadaan serta potensi perekonomian daerahnya sehingga masukan dan pandangan-pandangannya diharapkan mampu menjadi acuan dalam rangka pengendalian pembangunan

4. Publikasi Data

Tujuan pengelolaan data dan informasi perkembangan pembangunan perekonomian adalah agar pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah dapat berjalan dengan lancar sesuai kebutuhan dan perencanaan yang disusun oleh pemerintah.

Manfaat dari pengelolaan data dan informasi perkembangan pembangunan perekonomian oleh Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan adalah agar data dan informasi tersebut dapat dipublikasikan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kebijaksanaan pengendalian bidang perekonomian yang akan dilakukan pada unit kerja, instansi dan lembaga yang memerlukannya di Propinsi Sulawesi Selatan.

a. Koordinasi

Agar publikasi data dapat dilaksanakan dengan baik, dibutuhkan koordinasi antar unit kerja maupun instansi dan lembaga terkait sehingga data yang dipublikasikan tersebut dapat dijamin kebenarannya.

Pernyataan responden dari angket memperlihatkan bahwa kegiatan publikasi data masih kurang dilakukan oleh Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan karena dalam publikasi data belum dilaksanakan dengan baik antar instansi maupun lembaga dan unit kerja terkait. Tanggapan responden mengenai publikasi data dan

informasi perkembangan pembangunan perekonomian dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 20
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Publikasi Data dan Informasi Perkembangan Pembangunan Perekonomian

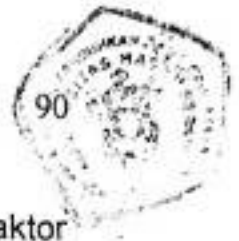
No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Selalu	4	14	44	20,28
2	Cukup	3	13	48	18,84
3	Kurang	2	32	68	46,38
4	Tidak Pernah	1	10	8	14,50
Jumlah			69	168	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Dari tanggapan responden di atas nampak dominan responden memberi jawaban publikasi data masih kurang dilakukan, yaitu 46,38 persen, dan hanya 20,28 persen responden memberi jawaban selalu dilakukan. Wawancara dengan informan diketahui bahwa dalam pelaksanaan publikasi data, kegiatan koordinasi belum dilaksanakan dengan baik sehingga aparat dalam mempublikasikan data mengalami hambatan berupa :

- a. Keakuratan dan kevalidan data tidak dapat dijamin karena data meskipun sudah diadakan seleksi namun kemungkinan kesalahan masih tetap ada.
- b. Tidak diketahui secara jelas jenis data yang akan dipublikasikan yang sesuai dengan kebutuhan.

Kelemahan yang terlihat di dalam publikasi data adalah pengolahan dan penyimpanan data yang belum dilaksanakan secara optimal. Dari



pengamatan dan wawancara, diketahui bahwa ada sejumlah faktor sehingga pengolahan dan penyimpanan data pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan belum berjalan dengan baik, yaitu : Sub-sub Bagian yang ada masih kurang mampu melaksanakan pengolahan dan penyimpanan data.

Tanggapan responden dari angket yang disebarakan memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengolahan dan penyimpan data pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan meskipun sudah baik namun masih perlu dioptimalkan karena masih ada responden yang cenderung memberi tanggapan kurang baik seperti sub-sub bagian pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing dalam mengolah dan menyimpan data. Untuk melaksanakan pengolahan dan penyimpanan data, setiap sub bagian yang ada dituntut kemampuannya untuk mengimplementasikan tugas pokok tersebut kedalam suatu tindakan yang nyata dan sesuai aturan-aturan yang ada. Kenyataan yang dapat diamati, unit kerja belum mampu mengimplementasikan semua kebijakan yang sudah diatur sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan aparat bekerja tidak dalam pola dan struktur yang sudah ditentukan sehingga tidak dapat diciptakan suatu keserasian gerak antar unit kerja lain dimana masing-masing unit kerja meskipun fungsi dan tugasnya berbeda, keterkaitannya dengan unit kerja lain adalah sangat erat.

Kelemahan yang nampak adalah Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan dalam upaya mempublikasikan data-data masih kurang mampu memanfaatkan sumber atau potensi dalam organisasi yang akan mendukung publikasi data. Potensi yang dimaksud adalah berupa pegawai, keterampilan dan pengetahuan, teknologi, anggaran serta fasilitas kerja lainnya.

Dari pengamatan memperlihatkan bahwa semua potensi di atas belum dapat dimanfaatkan dengan baik dalam proses publikasi data sehingga potensi yang ada kurang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengolahan dan penyimpanan data. Contohnya: penempatan pegawai yang masih kurang tepat, dimana ada pegawai pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan berlatar belakang pendidikan formal misalnya sarjana teknik (insinyur elektro), maupun pengalaman yang biasanya mengerjakan/mesin-mesin elektronik, tidak sesuai dengan bidang tugas kehumasan.

Dalam proses publikasi data, pengolahan dan penyimpanan adalah kegiatan yang penting mengingat pada tahap ini semua data yang sudah diproses disimpan untuk kemudian disajikan kembali apabila dibutuhkan. Jika pada tahap pengolahan dan penyimpanan data tidak dilaksanakan dengan baik, akan berdampak pada kurang akuratnya informasi yang disampaikan kepada khalayak.

Pada proses publikasi data, kegiatan yang dilakukan adalah berupa klasifikasi, Pengelompokan dan dokumenter. Dari pengamatan terlihat bahwa pelaksanaan klasifikasi data belum dilakukan dengan baik dan optimal.

Tanggapan responden yang dikumpulkan dari angket memperlihatkan pelaksanaan klasifikasi data masih belum dilaksanakan dengan baik, sehingga informasi yang diterima khalayak selain ada yang kurang akurat, dalam proses pencarian kembali data yang dibutuhkan memerlukan waktu yang cukup lama.

Dari wawancara diketahui bahwa tujuan klasifikasi data tidak lain adalah memilah dan memisah-misahkan jenis data sebelum dilakukan pengelompokan. Klasifikasi data harus dilakukan lebih awal karena dalam proses klasifikasi data akan diketahui jenis data yang merupakan data pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan sehingga dalam proses selanjutnya (pengelompokan) tidak lagi dijumpai kesulitan untuk penyimpanan dan publikasinya .

Kenyataan yang terlihat, klasifikasi data masih belum dilaksanakan dengan efektif, karena aparat dalam pengolahannya belum mampu mengenal dengan baik data yang dikumpulkan sesuai jenisnya sehingga pengklasifikasian seringkali dilakukan dengan keliru.

b. Pengelompokan

Setelah proses klasifikasi selesai dilakukan, maka proses selanjutnya adalah pengelompokan data. Kegiatan pengelompokan data

dilakukan setelah jelas klasifikasi dari data tersebut, seperti kelompok data pemerintahan, data pembangunan maupun data kemasyarakatan.

Dari pengamatan diketahui bahwa proses pengelompokan data pada pengolahan dan penyimpanan data masih belum dilakukan dengan baik. Tanggapan responden dari angket setelah diteliti ternyata mengindikasikan bahwa meskipun pelaksanaan pengelompokan data sudah dilakukan, namun masih perlu ditingkatkan lagi sehingga lebih memudahkan aparat jika dilakukan pencarian data.

Dari wawancara diketahui bahwa kegiatan pengelompokan data yang masih kurang baik pada dasarnya disebabkan karena klasifikasi terhadap data-data awal yang dapat dikumpulkan belum berjalan dengan baik. Selain itu aparat dalam melakukan pengelompokan tidak mengecek kembali apakah data yang sudah diklasifikasi tersebut sudah sesuai dengan jenis data. Hal ini menyebabkan dalam pengelompokan data, ada data yang dikelompokkan tidak sesuai dengan jenis dan klasifikasinya.

c. Dokumenter

Proses selanjutnya dari publikasi data adalah dokumenter. Kegiatan dokumenter adalah kegiatan menyimpan data yang sudah diinformasikan namun tetap dianggap penting sehingga disimpan dan dijadikan satu dokumen. Dokumenter penting dilakukan dengan baik, karena jika kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal, akan

mengakibatkan banyak data yang seharusnya masih harus disimpan, sudah tidak ditemukan lagi jika dibutuhkan

Dari pengamatan diketahui bahwa kegiatan dokumenter pada pengolahan informasi, sudah dilakukan dengan baik. Dari wawancara diketahui bahwa pelaksanaan dokumenter pada proses pengolahan data sudah dilakukan dengan baik sehingga saat ini jika dibutuhkan, data dapat disediakan dengan cepat. Adapun data yang tidak disimpan sebagai dokumenter disebabkan karena pada saat pengklasifikasian maupun pengelompokan data tidak dilakukan dengan baik.

Dalam upaya menyajikan dan menyebarkan data secara tepat guna dan berdayaguna bagi pihak yang membutuhkan, sangat dibutuhkan gerak kegiatan yang serasi antar semua aparat yang terlibat didalamnya. Gerak kegiatan yang dimaksud adalah segala daya upaya, segala sesuatu tindakan yang dikerjakan oleh atasan langsung atau pimpinan maupun kelompok kerja dalam melakukan tugasnya untuk dapat mewujudkan penyajian dan penyebaran data yang baik.

Agar penyajian dan penyebaran data dapat diselenggarakan dengan baik, upaya untuk menyatupadukan gerak kegiatan dalam arti saling keterkaitan pelaksanaan tugas pokok harus segera diadakan. Namun yang nampak saat ini adalah bahwa setiap unit kerja, aparat, dan pemanfaatan potensi berjalan sendiri-sendiri tanpa dapat diarahkan dengan baik. Dalam

hal ini tentu fungsi atasan langsung maupun pimpinan di unit kerja harus lebih ditingkatkan lagi.

Dari tanggapan responden berdasarkan angket setelah diteliti ternyata diketahui bahwa penyajian dan penyebaran data pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan sudah berlangsung dengan baik, meskipun harus lebih dioptimalkan.

Salah satu faktor yang menyebabkan sehingga pelaksanaan penyajian data masih perlu dioptimalkan adalah karena kesatupaduan yang seharusnya diwujudkan secara efektif masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Kesatupaduan artinya terdapat pertautan atau hubungan di antara unit kerja, antar pegawai sehingga mewujudkan suatu integritas atau suatu kesatuan yang kompak. Penelitian yang diadakan diketahui bahwa kesatupaduan dalam pelaksanaan pengumpulan data Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan masih kurang dapat diwujudkan dengan baik dan seksama. Hal ini menyebabkan adanya gejala antar unit kerja bekerja sesuai dengan kehendaknya masing-masing tanpa memperhatikan pentingnya diupayakan visi dan misi yang sama dalam pelaksanaan tugas pokok sehingga tidak terjadi kesalahan penyebaran informasi kepada khalayak yang pada akhirnya mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap cara kerja humas yang kurang baik.

Berdasarkan uraian di atas, nampak dengan jelas bahwa pelaksanaan pengumpulan dan penyajian data dalam penyelenggaraan

pengendalian pembangunan pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, cenderung sudah baik namun perlu lebih dioptimalkan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penyajian dan penyebaran data adalah sarana dan prasarana. Dengan kata lain terselenggaranya penyajian dan penyebaran data pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan selain dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan pengumpulan data, maka harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang baik, lengkap dan memadai. Dalam artian bahwa peralatan yang masih dapat digunakan dan dilengkapi dengan komputer dan kendaraan operasional di lapangan serta didukung fasilitas ruangan komputer yang memadai. Sarana dan prasarana yang lengkap baik jumlah maupun kualitasnya akan dapat mendukung keakuratan dan kecepatan distribusi data yang dilaksanakan Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

C. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Tujuan pengelolaan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tidak lain adalah mewujudkan efektivitas pengelolaannya sehingga data dan informasi yang dikelola dapat memberi kontribusi terhadap proses perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan di daerah ini. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan data dan informasi yang dilakukan pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, tanggapan responden terhadap keempat proses pengelolaan data dan informasi akan dikemukakan berikut ini.

1. Pengumpulan Data dan Informasi

Efektivitas pengumpulan data dan informasi sangat ditentukan oleh ketepatan dan kecepatan pengumpulan data yang dilakukan. Dari penelitian yang dilakukan ternyata ketepatan dan kecepatan pengumpulan data dan informasi belum dapat diwujudkan sepenuhnya sehingga dapat diasumsikan bahwa pengumpulan data dan informasi belum efektif. Distribusi jawaban responden mengenai efektivitas pengumpulan data dan informasi dapat dilihat pada tabel 21.

Tabel 21
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Efektivitas Pengumpulan Data dan Informasi

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Efektif	4	7	28	10,14
2	Cukup efektif	3	10	30	14,50
3	Kurang efektif	2	41	82	59,42
4	Tidak efektif	1	11	11	15,94
Jumlah			69	151	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Distribusi jawaban responden pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengumpulan data dan informasi dipandang kurang efektif oleh responden

karena dominan responden yang memberi tanggapan "kurang efektif" yaitu sebanyak 41 orang atau 59,42 persen dan 7 orang atau 10,14 persen responden memberi tanggapan efektif.

Dari penelitian yang diadakan diketahui bahwa kurang efektifnya pengumpulan data dan informasi karena proses pelaksanaannya belum dapat dilakukan dengan cepat, dalam arti tidak sesuai dengan rencana yang sudah disusun (tidak tepat waktu) yang mengakibatkan jadwal penyusunan rencana menjadi tertunda. Selain itu ketepatan pengumpulan data juga belum dapat diwujudkan karena sebagian data-data yang sudah dikumpulkan kurang sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada mengenai sektor perekonomian daerah. Kecepatan dan ketepatan Proses pengumpulan data dan informasi belum dapat diwujudkan menunjukkan bahwa kegiatan pengumpulan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan belum efektif.

2. Analisa dan Penilaian

Agar memberi kontribusi terhadap penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan di daerah, efektivitas analisa dan penilaian data dan informasi sangat dibutuhkan. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kegiatan analisa dan penilaian juga belum dapat dilakukan dengan efektif. Distribusi jawaban responden terhadap efektivitas analisa dan penilaian dapat dilihat pada tabel 22.

Tabel 22
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Efektivitas Analisa Dan Penilaian Data dan Informasi

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Efektif	4	12	48	17,39
2	Cukup efektif	3	21	63	30,44
3	Kurang efektif	2	26	52	37,68
4	Tidak efektif	1	10	10	14,49
Jumlah			69	173	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Dari tabel 22 di atas menunjukkan bahwa kegiatan analisa dan penilaian data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan masih kurang efektif karena dominan responden memberi tanggapan kurang efektif, yaitu sebanyak 26 orang atau 37,68 persen, dan 12 orang atau 17,39 persen menanggapi efektif.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui kurang efektifnya kegiatan analisa dan penilaian terhadap data dan informasi yang sudah dikumpulkan karena analisa dan penilaian terhadap data dan informasi belum menghasilkan data yang valid dan akurat sehingga dalam proses pengolahan data selanjutnya sering diadakan pengulangan atau koreksi karena setelah dicermati data dan informasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan situasi data yang ada dan dimiliki oleh instansi/lembaga dan unit kerja terkait. Kondisi ini mempengaruhi proses penyusunan rencana dan pelaksanaan

pembangunan karena akan mempengaruhi kualitas perencanaan yang dihasilkan.

3. Pelaporan

Efektivitas pelaporan sangat ditentukan oleh ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan. Berdasarkan pengamatan terlihat bahwa laporan data dan informasi pembangunan khususnya sektor perekonomian masih kurang tepat waktu sehingga belum sepenuhnya memberi kontribusi terhadap perencanaan yang hendak disusun. Distribusi jawaban responden terhadap pelaporan dapat dilihat pada tabel 23.

Tabel 23
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Efektivitas Pelaksanaan Pelaporan Data dan Informasi

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Efektif	4	12	36	17,39
2	Cukup efektif	3	14	42	20,29
3	Kurang efektif	2	40	80	57,97
4	Tidak efektif	1	3	3	4,35
Jumlah			69	161	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Tabel 23 di atas menunjukkan bahwa pelaporan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan masih kurang efektif, karena dominan responden memberi

jawaban kurang efektif yaitu sebanyak 40 orang atau 57,97 persen dan 12 orang atau 17,39 persen yang memberi tanggapan efektif.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pelaporan terhadap data dan informasi yang telah dianalisa masih kurang tepat waktu dan kurang sesuai dengan kebutuhan terhadap kegiatan rencana yang akan disusun. Hal ini menyebabkan terganggunya proses penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah ini. Kurang tepatnya pelaporan terhadap data dan informasi menyebabkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam upaya meningkatkan pembangunan perekonomian di daerah tidak dapat diwujudkan dengan baik.

4. Publikasi Data

Data dan informasi yang diolah tujuan akhirnya adalah agar dapat menjadi pedoman dan masukan terhadap instansi/dinas dan unit kerja terkait untuk penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk itu, hasil pengelolaan harus dipublikasikan agar dapat menjadi sumber informasi baik untuk aparat maupun masyarakat yang memerlukannya. Distribusi jawaban responden terhadap efektivitas publikasi data, dapat dilihat pada tabel 25.



Tabel 24
Distribusi Jawaban Responden Terhadap
Efektivitas Publikasi Data dan Informasi

No	Indikator	Score	Frekuensi (F)	Nilai	Persentase (%)
1	Efektif	4	12	28	17,39
2	Cukup efektif	3	14	30	20,29
3	Kurang efektif	2	34	82	49,27
4	Tidak efektif	1	9	11	13,05
Jumlah			69	151	100,00

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2003

Tabel 24 di atas menunjukkan bahwa publikasi data pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan masih kurang efektif yaitu sebanyak 82 orang responden atau 49,27 persen, dan 12 orang atau 17,39 % memberi tanggapan efektif.

Dari peneitian diketahui bahwa kurang efektifnya publikasi data dan informasi pembangunan pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan karena publikasi data yang dilakukan belum sepenuhnya dapat menjadi bahan informasi bagi dinas/ instansi dan unit kerja untuk menyusun rencana-rencana kerjanya. Hal ini karena publikasi data yang dilakukan tidak didukung oleh sarana dan prasarana berupa ruangan yang representatif maupun sarana lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan publikasi data dan informasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan belum dilakukan dengan baik, karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana, serta pegawai yang masih kurang kemampuannya baik dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalamannya. Hal ini mengakibatkan analisa dan penilaian data belum dilaksanakan dengan baik melalui pencatatan dan penilaian serta pelaporan akurat.
2. Efektivitas pengelolaan data dan informasi pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Propinsi Sulawesi Selatan masih rendah terlihat dari pengumpulan data belum dilakukan dengan baik, analisa dan penilaian masih kurang sesuai dengan data dan informasi yang tersedia, dan publikasi data yang belum berlangsung dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dilakukan, maka saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. Agar proses pengelolaan data dan informasi dapat berlangsung dengan baik, maka sebaiknya :
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana berupa faximile dan komputer sesuai kebutuhan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, dan menambah jumlah pegawai yang dilibatkan dalam pengumpulan data sekurang-kurangnya 5 orang..
 - b. Dalam pelaksanaan analisa dan penilaian, SDM aparat yang menangani masalah dapat lebih ditingkatkan kemampuannya melalui pelaksanaan diklat teknis sesuai bidang tugasnya sehingga pencatatan dan penilaian dapat lebih efektif.
 - c. Pelaksanaan pelaporan sebaiknya lebih ditingkatkan dengan mengoptimalkan peringkasan dan penyusunan data sesuai klasifikasi dan jenis-jenis sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi penyusunan rencana selanjutnya.
 - d. Meningkatkan proses koordinasi, pengelompokan dan pelaksanaan dokumenter dengan mengoptimalkan komunikasi antar unit kerja,. sehingga data-data yang dikumpulkan dapat dicari dengan tepat waktu sesuai kebutuhan.

2. Pengumpulan dilakukan dengan berpedoman pada data-data yang ada pada dinas/instansi dan unit kerja terkait. Selain itu analisa dan penilaian terhadap data dan informasi dilakukan dengan baik dan pelaporan dapat tepat waktu sesuai jadwal. Agar publikasi data dapat lebih diefektifkan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti ruangan, dan menambah jumlah komputer untuk penyimpanan data.
3. Disarankan agar mekanisme pengelolaan data dan informasi pembangunan ekonomi menggunakan proses komputerisasi dengan sistem on line sehingga data dan informasi dapat lebih cepat diolah dan dicari sesuai kebutuhan unit kerja terkait dan pihak lain yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Effendy, Uchjana, Onong, 1989, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Gasver, Vincent, 1989, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta, Gramedia
- Gordon B. Davis, 1994, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta, Seri Manajemen No. 90-B, Bagian II Struktur dan Pengembangannya, PT. Binaman, Pressiendo
- Josef, Riwu, Kaho, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Kamus Istilah Manajemen, 1991, Jakarta, Balai Pustaka
- Komaruddin, 1994, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Komorotomo, Wahyudi (1991), *Manajemen Pembangunan*, Jakarta, LP3ES
- Liang The, Gie, 1989, *Administrasi Perkantoran Modern*, Jakarta, Balai Pustaka
- Moekijat 1991, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Haji Masagung
- Poetranto, 1991, *Manajemen Proyek Pembangunan*, Jakarta, Balai Pustaka
- Priyono, 1992, *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Soemardi Rekso Peotranto, 1991, *Manajemen Proyek Pembangunan*, Jakarta, Balai Pustaka
- Soedjadi, F.X., 1995, *Organisasi dan Methode (O & M)*, Jakarta, Haji Masagung
- Sugiyono, 1997, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta

Todaro, 2000, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta, Rajawali

Tjokroamidjoyo, Bintoro, 1995, *Manajemen Pembangunan*, Jakarta, Hajimasagung

————— 1988, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta, LP3ES

Triatmodjo, 1979, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Gunung Agung

White dan Bryant, 1987, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Gramedia

Westra, Parieta, Dkk, 1991, *Mewujudkan Efektivitas dalam Organisasi*, Jakarta, Pustaka Jaya

Wirasaputra, 1979, *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta, Balai Pustaka

DOKUMEN-DOKUMEN :

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Garis-Garis Besar Haluan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2000 – 2004

Departemen Pendidikan dan kebudayaan 1993

ANGKET/KUESIONER

Keterangan

Penyebaran angket ini, sifatnya murni ilmiah dan tidak terkandung maksud-maksud lain didalamnya. Tujuan angket adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai pengelolaan Data dan Informasi untuk keperluan penyusunan *Tesis* Kami.

Identitas dan jawaban saudara akan kami rahasiakan, oleh karena itu sangat diharapkan partisipasi saudara memberi jawaban dengan sebenarnya sesuai pengalaman dan pengamatan bapak/ibu. Jawaban Bapak/Ibu yang obyektif akan sangat menentukan keberhasilan kami untuk mengumpulkan data dan informasi yang kami butuhkan.

IDENTITAS RESPONDEN

NAMA	:
PENDIDIKAN FORMAL	:
PEKERJAAN/UNIT KERJA	:

PERTANYAAN

1. Apakah saudara, dilakukan pengumpulan sebelum proses pengelolaan dilaksanakan?
 - a. Selalu dilakukan
 - b. Cukup dilakukan
 - c. Kurang dilakukan
 - d. Tidak dilakukan
2. Bagaimana menurut saudara, persiapan pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan selama ini?
 - a. Selalu dilakukan
 - b. Cukup dilakukan
 - c. Kurang dilakukan
 - d. Tidak dilakukan

3. Apakah menurut saudara, pelaksanaan pengumpulan data sudah dilakukan dengan tepat waktu?
 - a. Tepat waktu
 - b. Cukup tepat waktu
 - c. Kurang tepat waktu
 - d. Tidak tepat waktu

4. Bagaimana menurut sarana dan prasarana pengumpulan data yang tersedia?
 - a. Sangat lengkap
 - b. Cukup lengkap
 - c. Kurang lengkap
 - d. Tidak lengkap

5. Bagaimana menurut saudara kemampuan SDM dalam pengelolaan data dan informasi dipandang dari pendidikan formalnya?
 - a. Sangat mampu
 - b. Cukup mampu
 - c. Kurang mampu
 - d. Tidak mampu

6. Apakah menurut saudara, penempatan aparat dalam pengelolaan data dan informasi sudah tepat?
 - a. Sesuai sesuai
 - b. Cukup sesuai
 - c. Kurang sesuai
 - d. Tidak sesuai

7. Bagaimana menurut saudara, keterampilan aparat dalam pengelolaan data dan informasi?
 - a. Sangat terampil
 - b. Cukup terampil
 - c. Kurang terampil
 - d. Tidak terampil

8. Apakah analisa dan penilaian terhadap data yang sudah dikumpulkan sudah dilakukan?
 - a. Selalu dilakukan
 - b. Cukup dilakukan
 - c. Kurang dilakukan
 - d. Tidak dilakukan

9. Apakah dalam penganalisaan data dan informasi selalu dilakukan pencatatan?
- Selalu dilakukan
 - Cukup dilakukan
 - Kurang dilakukan
 - Tidak dilakukan
10. Apakah dalam pencatatan yang dilakukan pernah terjadi kekeliruan?
- Selalu
 - Cukup
 - Kadang-kadang
 - Tidak pernah
11. Selain kekeliruan, apakah selama ini pernah terjadi keterlambatan dalam proses pencatatan?
- Sering
 - Cukup
 - Kadang-kadang
 - Tidak pernah
12. Bagaimana menurut saudara, penilaian terhadap data dan informasi yang sudah dikumpulkan?
- Selalu dilakukan
 - Cukup dilakukan
 - Kurang dilakukan
 - Tidak dilakukan
13. Apakah selama ini, dilakukan peringkasan terhadap data dan informasi yang sudah dianalisis?
- Selalu dilakukan
 - Cukup dilakukan
 - Kurang dilakukan
 - Tidak dilakukan
14. Apakah menurut saudara, dalam pengelolaan data dan informasi melibatkan seluruh dinas/instansi terkait?
- Selalu dilibatkan
 - Cukup terlibat
 - Kurang terlibat
 - Tidak terlibat

15. Apakah menurut saudara, penyusunan laporan dilakukan terhadap hasil pengelolaan data dan informasi?
- Selalu dilakukan
 - Cukup dilakukan
 - Kurang dilakukan
 - Tidak dilakukan
16. Bagaimana menurut saudara, ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pengelolaan data dan informasi?
- Sangat tepat waktu
 - Cukup tepat waktu
 - Kurang tepat waktu
 - Tidak tepat waktu
17. Apakah menurut saudara, unit kerja/instansi/lembaga terkait terlibat dalam proses pelaporan?
- Selalu terlibat
 - Cukup terlibat
 - Kurang terlibat
 - Tidak terlibat
18. Apakah selama ini, hasil pengelolaan data dan informasi sudah dipublikasikan?
- Selalu
 - Cukup
 - Kurang
 - Tidak
19. Apakah menurut saudara, pengelolaan data dan informasi sudah dilaksanakan dengan efektif?
- Sangat efektif
 - Cukup efektif
 - Kurang efektif
 - Tidak efektif
20. Apakah menurut saudara, Analisa dan penilaian data sudah dilakukan dengan efektif?
- Sangat efektif
 - Cukup efektif
 - Kurang efektif
 - Tidak efektif

21. Apakah menurut Saudara pelaporan data dan informasi sudah dilaksanakan dengan efektif?
- Efektif
 - Cukup efektif
 - Kurang efektif
 - Tidak efektif
22. Apakah menurut saudara publikasi data sudah dilaksanakan dengan efektif?
- Sangat efektif
 - Cukup efektif
 - Kurang efektif
 - Tidak efektif

PANDUAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengumpulan data dalam pengelolaan informasi dan pengendalian pembangunan pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah dalam pelaksanaan pengumpulan data, SDM mendukung kegiatannya?
3. Bagaimana sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengumpulan data pengelolaan informasi dan pengendalian pembangunan pada Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Bagaimanakah kegiatan analisa dan penilaian terhadap pengelolaan informasi dan pengendalian pembangunan
5. Apakah dalam analisa dan penilaian tersebut sudah dilakukan pencatatan dengan baik?
6. Apakah penilaian juga sudah dilakukan dengan baik?
7. Bagaimanakah proses pelaporan pengelolaan informasi dan pengendalian pembangunan selama ini?
8. Apakah dalam pelaporan tersebut dilakukan kegiatan meringkas data dan informasi?

9. Bagaimanakah proses penyusunan data dan informasi untuk kegiatan pelaporan?
10. Bagaimanakah kegiatan publikasi terhadap data dan informasi?
11. Apakah sebelum data dipublikasikan sudah dilakukan pengelompokan terhadap data dan informasi?
12. Bagaimanakah kegiatan dokumenter untuk mempublikasikan data dan informasi?